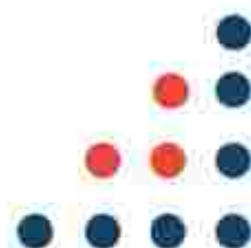




LKIP 2024

**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, telah menetapkan rencana kinerja, target, realisasi dan capaian kinerja selama satu tahun anggaran. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran tersebut kemudian disampaikan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024.

Target kinerja tahun 2024 yang telah tercapai terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2023-2026 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Target dalam Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 hampir seluruh capaiannya melebihi target kinerja, yaitu dengan rata-rata capaian sebesar **101,39%** dengan realisasi anggaran mencapai **97,04%**. Seluruh target kinerja sasaran organisasi telah terpenuhi, tetapi terdapat beberapa sasaran yang realisasi kinerjanya melebihi target yakni Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah yang diukur melalui Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan realisasi 101,96% dari target 96,5%. Selanjutnya, sasaran Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik dengan realisasi 86,11% terhadap target kinerja 85%.

Dalam perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang Tahun 2024, terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya pencapaian target kinerja. Beberapa langkah yang telah dilakukan adalah koordinasi antar unit kerja untuk mereviu target kinerja pada dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, koordinasi dan sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan lingkup Bappelitbangda serta fasilitasi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan termasuk penetapan target kinerja.

Selain itu, Bappelitbangda juga telah melakukan reviu dokumen Renstra secara periodik sebagai bahan dan pertimbangan dalam menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik serta selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah, terutama dalam hal penyusunan sasaran dan indikator sasaran, program dan indikator program, sehingga dapat menunjang capaian kinerja secara berjenjang.

Persentase capaian kinerja sasaran Bappelitbangda Kota Cimahi berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun anggaran 2024 dapat disampaikan melalui tabel berikut:

**Persentase Capaian Indikator Sasaran Kinerja
Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN (%)
A	B	C	D
1	Tujuan : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	104,18
	Sasaran :		
1.a	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100
2	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	106,17
	Sasaran :		
2.a	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100
		Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	101,96
2.b	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	101,31



NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN (%)
A	B	C	D
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	100

Data persentase capaian indikator sasaran kinerja Bappelitbangda pada tabel di atas diperoleh melalui hasil monitoring dan evaluasi Rencana Kerja dan Rencana Aksi Tahun 2024, adapun capaian target indikator sasaran kinerja seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan (di atas 100%) dengan rata-rata capaian sebesar 102,44%.

Cimahi, 28 Februari 2025
KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI,



ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730413 199803 1 006

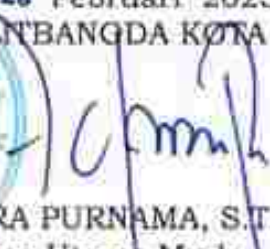


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas atas kinerja pencapaian sasaran strategis sepanjang Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja harus menggambarkan pertanggungjawaban kinerja yang transparan, efektif dan efisien menuju terwujudnya *good governance* dan *clean governance*. Akuntabilitas kinerja ditunjukkan dengan indikator kinerja yang berorientasi hasil dan bernilai manfaat bagi *stakeholders* dan masyarakat.

LKIP Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan hasil pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis yang memadai terhadap pencapaian kinerja, yang diukur berdasarkan capaian target indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Cimahi, 28 Februari 2025
KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI,

ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730413 199803 1 006



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Gambaran Umum dan Isu-isu Strategis	5
1.3.1 Gambaran Umum	5
1.3.2 Proses Bisnis Bappelitbangda	7
1.3.3 Isu Strategis dan Solusi Permasalahan	13
1.4 Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Rencana Strategis	22
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024	34
3.2 Analisis Capaian Kinerja	36
3.2.1 Sasaran ke 1 – Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	36
3.2.2 Sasaran ke 2 – Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan	39
3.2.3 Sasaran ke 3 – Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci	43
3.2.4 Sasaran ke 4 – Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	47
3.2.5 Sasaran ke 5 – Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	51
3.2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55



3.2.7 Dukungan Capaian Indikator Program terhadap Pencapaian Kinerja Strategis Bappelitbangda Kota Cimahi	60
3.2.8 Upaya Perbaikan dalam Mengakselerasi Kinerja Strategis pada Bappelitbangda Kota Cimahi	62
3.3 Realisasi Anggaran	67
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Tantangan	69
4.2 Upaya Perbaikan	70
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	14
Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026	25
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kota Cimahi	26
Tabel 2.3 Keterkaitan Sasaran dan Program yang mengacu pada Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026	26
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	28
Tabel 2.5 Program, Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024	29
Tabel 2.6 Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023	32
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja	34
Tabel 3.2 Pencapaian Tujuan Bappelitbangda Tahun 2024	35
Tabel 3.3 Telaahan terhadap Capaian Kinerja Urusan Perencanaan di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat	37
Tabel 3.4 Telaahan terhadap Capaian Kinerja Urusan Kelitbangan di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat	48
Tabel 3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran	58
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Program Bappelitbangda Tahun 2024	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Cimahi	6
Gambar 1.2 Dasar Pemetaan Proses Bisnis	7
Gambar 1.3 Proses Bisnis Kota Cimahi	8
Gambar 1.4 Bagan Proses Bisnis Bappelitbangda Kota Cimahi	9
Gambar 1.5 Bagan Struktur Proses Bisnis Perencanaan Pembangunan Bappelitbangda Kota Cimahi	10
Gambar 1.6 Bagan Struktur Proses Bisnis Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappelitbangda Kota Cimahi	11
Gambar 1.7 Bagan Struktur Proses Bisnis Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kota Cimahi	12
Gambar 1.8 <i>Fold Grand Cascading</i> Bappelitbangda Kota Cimahi	17
Gambar 1.9 Peta Jabatan Pegawai pada Bappelitbangda Tahun 2024	18
Gambar 2.1 Alokasi Pagu Anggaran Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024	31
Gambar 3.1 Infografis Capaian Kinerja Sasaran ke 1 Tahun 2024	36
Gambar 3.2 Faktor-faktor Pendorong yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	38
Gambar 3.3 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	39
Gambar 3.4 Infografis Capaian Kinerja Sasaran ke 2 Tahun 2024	40
Gambar 3.5 Faktor-faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan	41
Gambar 3.6 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada Indikator Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan	42
Gambar 3.7 Infografis Capaian Kinerja Sasaran ke 3 Tahun 2024	44
Gambar 3.8 Faktor-faktor Pendorong yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Persentase Capaian IKK	45

Gambar 3.9 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada Indikator Persentase Capaian IKK	46
Gambar 3.10 Infografis Capaian Kinerja Sasaran ke 4 Tahun 2024	47
Gambar 3.11 Faktor-faktor Pendorong yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	49
Gambar 3.12 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada Indikator Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	51
Gambar 3.13 Infografis Capaian Kinerja Sasaran ke 5 Tahun 2024	52
Gambar 3.14 Faktor-faktor Pendorong yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	53
Gambar 3.15 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada Indikator Nilai Evaluasi RB Bappelitbangda	54
Gambar 3.16 Dukungan Sumber Daya Manusia Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Kota Cimahi	56
Gambar 3.17 Upaya Perbaikan dalam Meningkatkan Kinerja Bappelitbangda pada Tahun 2025	63
Gambar 3.18 Pagu Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2024	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi Pemerintahan difokuskan pada pencapaian tiga sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), yang optimal melalui penetapan indikator kinerja yang terukur dan dilaporkan secara periodik dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran sehingga laporan kinerja dapat memberikan informasi pencapaian kinerja yang terukur terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, keselarasan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi dengan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda dapat dicapai melalui penetapan tujuan, sasaran serta program yang konsisten sampai dengan tahap penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Keselarasan juga dilakukan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP), Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan, Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta dokumen lainnya. Indikator kinerja tersebut harus berorientasi hasil

dan dapat diukur tingkat capaiannya, guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur menuju terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023);
 18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 306 Tahun 2024);
 19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
 20. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
 21. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
 22. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 644);
 23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 139);
 24. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 717 Tahun 2023);
 25. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024).

1.3 Gambaran Umum dan Isu-isu Strategis

1.3.1 Gambaran Umum

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Susunan Organisasi Bappelitbangda Kota Cimahi, terdiri atas:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c) Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- g) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- h) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- i) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Cimahi

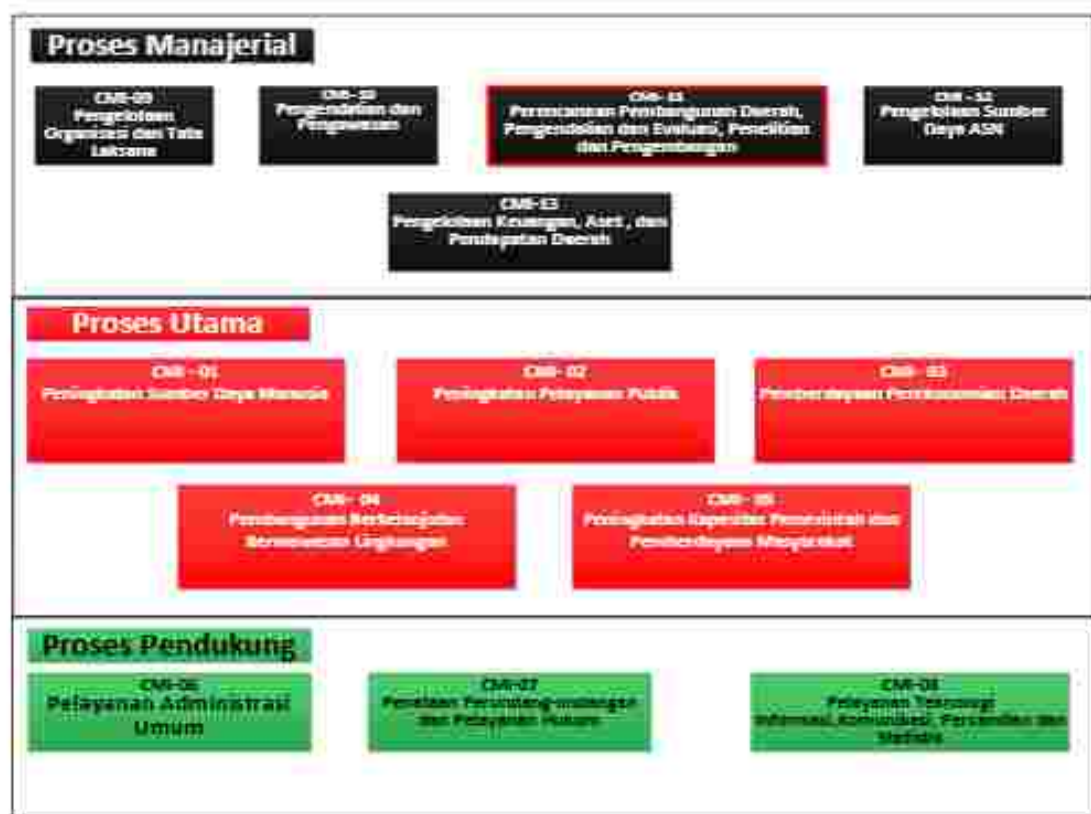
Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Bappelitbangda Kota Cimahi diuraikan pada Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi. Bappelitbangda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah.

1.3.2 Proses Bisnis Bappelitbangda

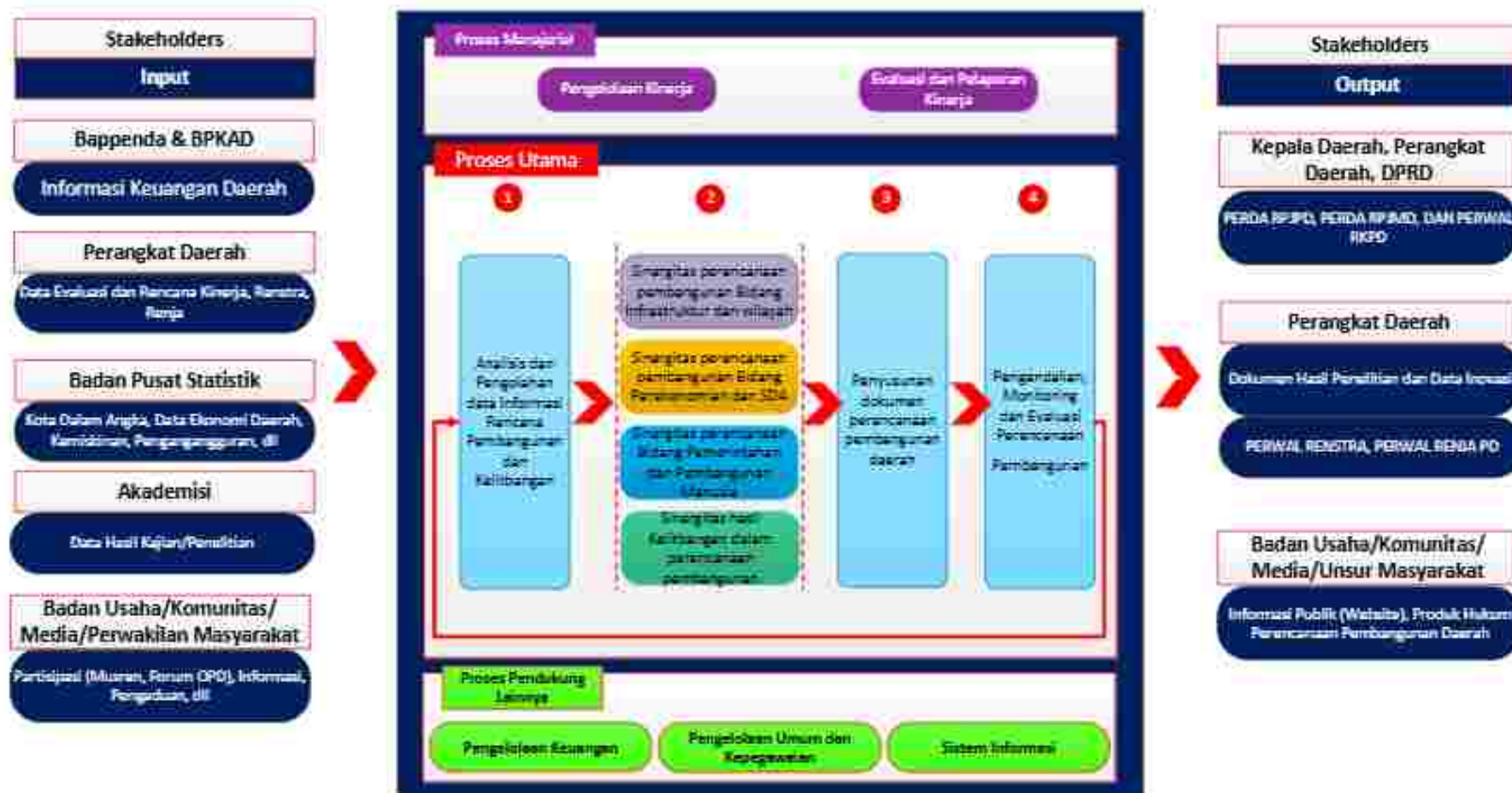
Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik, untuk itu diperlukan peta proses bisnis bagi setiap instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



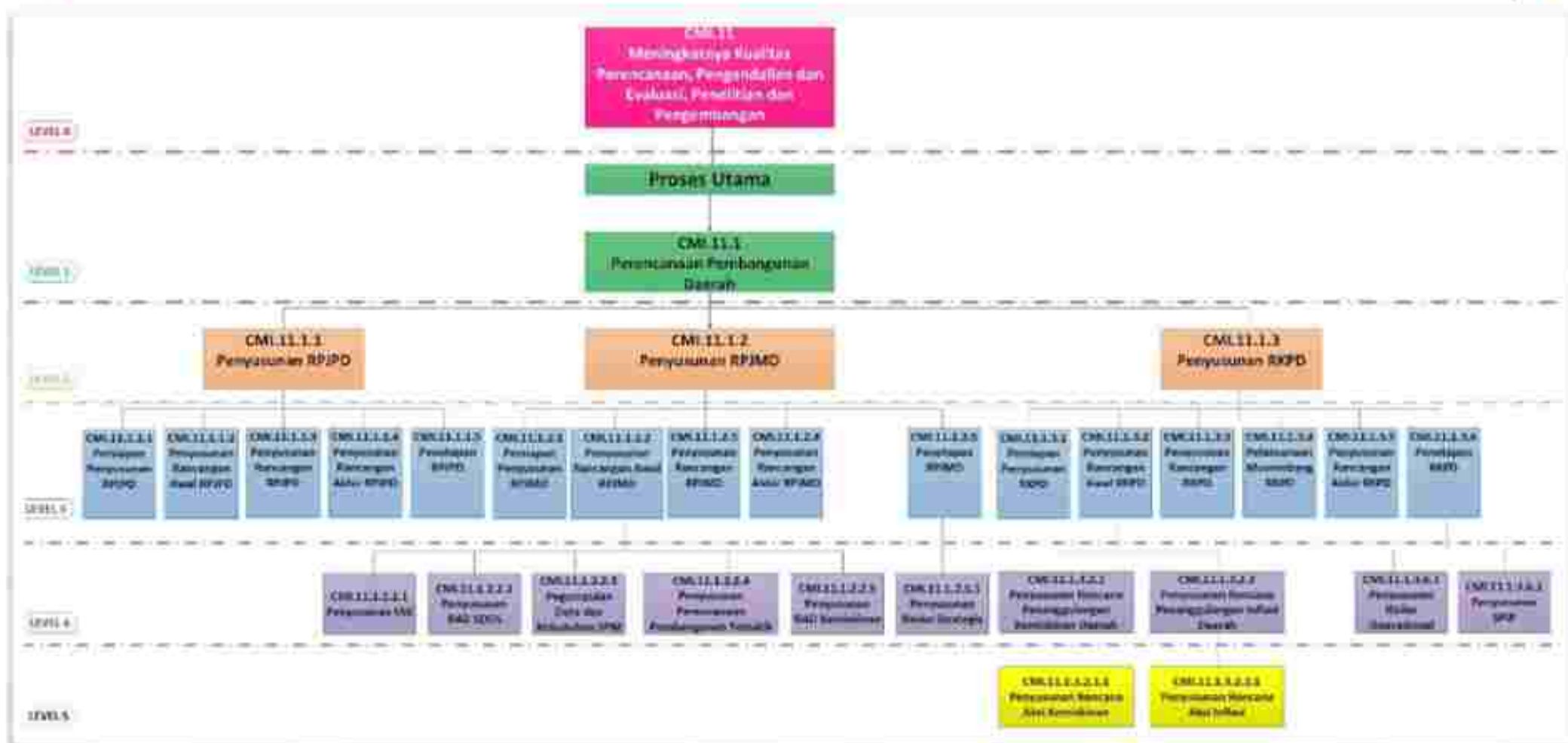
Gambar 1.2 Dasar Pemetaan Proses Bisnis



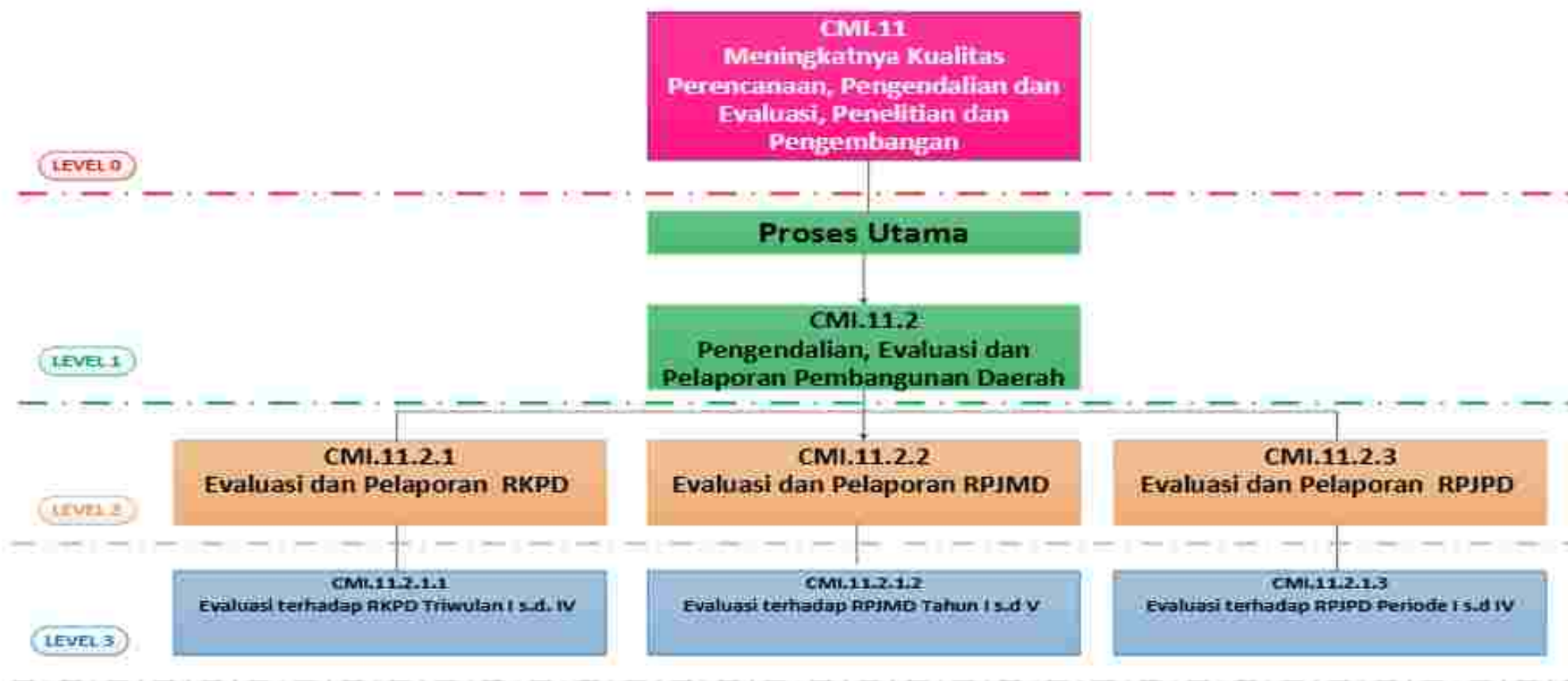
Gambar 1.3 Proses Bisnis Kota Cimahi



Gambar 1.4 Bagan Proses Bisnis Bappedalitbangda Kota Cimahi



Gambar 1.5 Bagan Struktur Proses Bisnis Perencanaan Pembangunan Bappelitbangda Kota Cimahi



Gambar 1.6 Bagan Struktur Proses Bisnis Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappelitbangda Kota Cimahi



Gambar 1.7 Bagan Struktur Proses Bisnis Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kota Cimahi

Peta proses bisnis Bappelitbangda Kota Cimahi sebagaimana ditampilkan pada **Gambar 1.3 dan 1.4** mengacu pada proses bisnis Kota Cimahi, yaitu pada proses manajerial sebagai pengampu perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan. Dari proses bisnis kota, diidentifikasi komponen *supplier* (sumber data dan informasi kebutuhan layanan) dan *input* yang menjadi bahan proses utama dalam rangka menghasilkan *output* yang dapat digunakan/dimanfaatkan oleh *customer* (pengguna layanan).

Proses bisnis Bappelitbangda Kota Cimahi pada **Gambar 1.4**, menjelaskan mekanisme input, berupa data, informasi, partisipasi aktif sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses utama, yaitu *core business* tugas dan fungsi Bappelitbangda pada perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, serta penelitian dan pengembangan, yang diuraikan dalam sasaran program.

Proses utama perlu didukung dengan proses manajerial berupa proses perencanaan dan evaluasi kinerja serta proses pendukung lainnya berupa dukungan tata laksana organisasi dan sistem berupa aplikasi penunjang perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan. Proses utama menghasilkan output berupa kebijakan dan dokumen hasil perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, serta penelitian dan pengembangan.

Alur proses bisnis Bappelitbangda Kota Cimahi dijabarkan dalam struktur proses bisnis utama sebagaimana dijelaskan pada **Gambar 1.5** sampai dengan **Gambar 1.7**. Struktur proses telah disusun berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda sesuai dengan bidang pengampu sebagai dasar pencapaian kinerja program. Berdasarkan struktur proses bisnis, disusun peta lintas fungsi dan sub proses untuk setiap *core business* Bappelitbangda.

Proses bisnis Bappelitbangda Kota Cimahi menjadi acuan dalam penyusunan standar operasional prosedur, yang kemudian menjadi petunjuk teknis mekanisme kerja dalam pencapaian kinerja.

1.3.3 Isu Strategis dan Solusi Permasalahan

Bappelitbangda Kota Cimahi dibentuk dalam rangka menjalankan peran penunjang pemerintahan dalam urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, yaitu:

1. Upaya peningkatan keselarasan pembangunan di daerah dalam rangka peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, provinsi dan pusat;
2. Menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan di daerah melalui kualitas perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif serta dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.

Merujuk pada peran Bappelitbangda dalam urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, terdapat pemetaan masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Belum optimalnya sinergitas perencanaan	Perencanaan masih bersifat sektoral
		Belum optimalnya capaian kinerja sasaran	Baseline data awal yang belum tersedia
			Indikator kinerja yang tidak dapat diukur
2	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Belum seluruhnya usulan masyarakat musrenbang kota dapat diakomodir dalam RKPD	Belum terwakilinya unsur masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang kota
3	Belum optimalnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Belum terjawabnya permasalahan kota dengan hasil Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah yang berkualitas	Kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengembangan Daerah belum sesuai kebutuhan
			Inovasi dan Teknologi Daerah belum dapat dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya tata kelola kinerja Bappelitbangda	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kompetensi aparatur belum memenuhi ketentuan

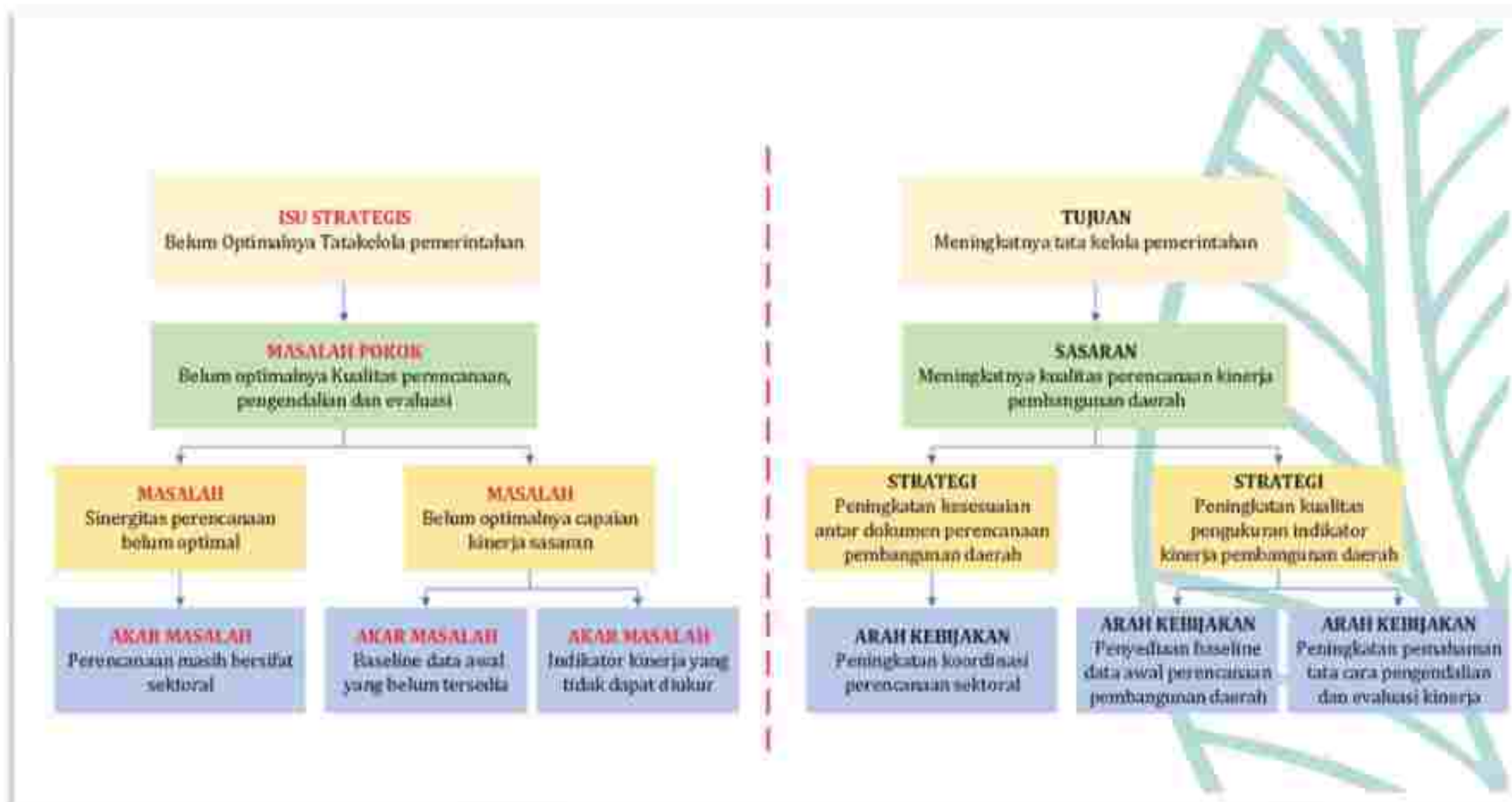
Sumber: Hasil Telaahan, 2024

Berdasarkan telaahan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda, telaahan terhadap visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, telaahan terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta merujuk pada perubahan regulasi secara nasional, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Bappelitbangda tahun sebelumnya, permasalahan dan prediksi tantangan ke depan, maka dirumuskan isu-isu dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, yaitu :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang implementatif masih rendah;
3. Perencanaan pembangunan antara tingkat Pemerintah Provinsi dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah belum selaras;
4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan belum optimal;
5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD;
6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia aparatur yang kompeten;
7. Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya dimanfaatkan menjadi bahan rujukan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya;
8. Pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta

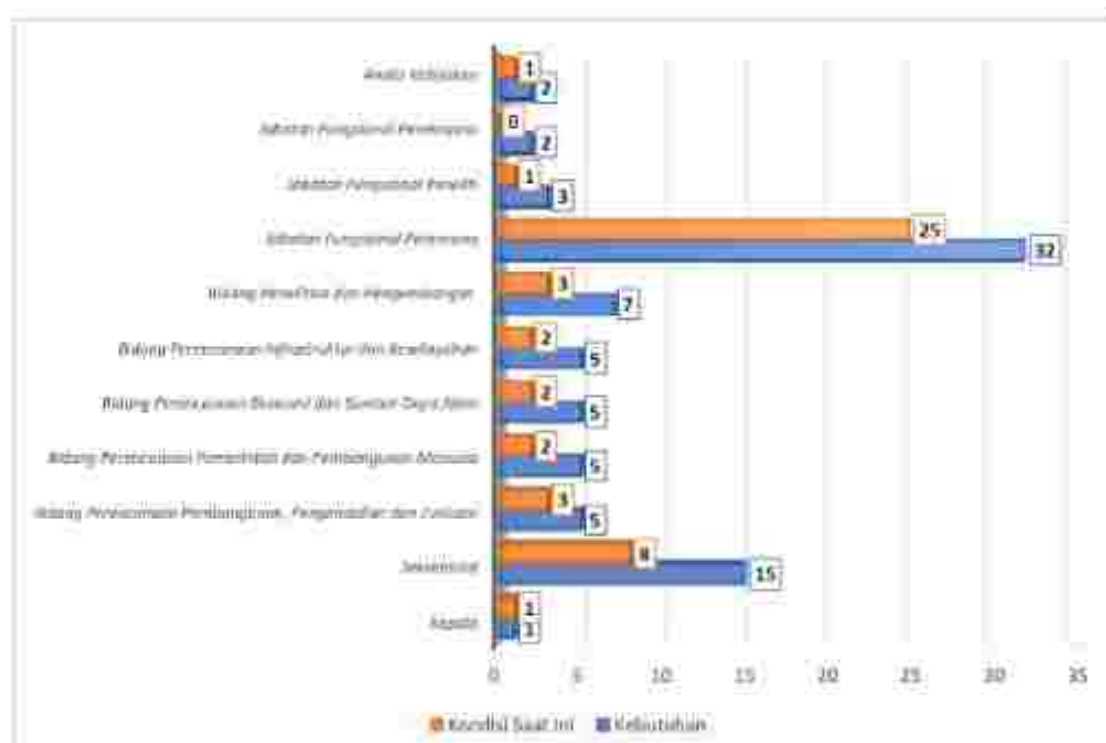
- teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan belum optimal;
9. Hasil kelitbangan belum dapat menjawab permasalahan strategis kota;
 10. Tingkat pemanfaatan hasil kajian kelitbangan yang dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan belum optimal;
 11. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, dirumuskan isu strategis dan pohon kinerja sebagai intervensi penyelesaian dapat digambarkan dalam *fold grand cascading* sebagai berikut:



Gambar 1.8 Fold Grand Cascading Bappelitbangda Kota Cimahi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan, Bappelitbangda Kota Cimahi didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terdiri dari 50 (lima puluh) orang Aparatur Sipil Negara (terdiri dari 47 PNS dan 3 PPPK), 14 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dan 3 (tiga) orang Tenaga Ahli. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, mayoritas pegawai Bappelitbangda merupakan lulusan S-2 sebanyak 26 orang (52%), S-1/D-IV sebanyak 19 orang (38%), D-III sebanyak 2 orang (4%) dan SMA sebanyak 2 orang (4%). Sebaran peta jabatan pada Bappelitbangda Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1.9 Peta Jabatan Pegawai pada Bappelitbangda Tahun 2024

Berdasarkan grafik dan informasi yang tersaji dalam Gambar 2.11 dapat diketahui jumlah eksisting pegawai di semua unit kerja pada Bappelitbangda Kota Cimahi. Data dan informasi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pegawai pada masing-masing unit kerja masih berada di bawah jumlah kebutuhan yang diharapkan. Saat ini, jabatan fungsional yang ketersediaannya masih berada di bawah kuota analisis beban kerja (ABK) terdiri dari Jabatan Fungsional Perekayasa dan Jabatan Fungsional Peneliti. Kedua jabatan fungsional tersebut ketersediaannya masih berada jauh di bawah jumlah kebutuhannya. Sedangkan Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan saat ini ketersediaannya sudah hampir mendekati dengan jumlah kebutuhannya.

Berdasarkan peta jabatan pegawai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi kepegawaian Bappelitbangda Kota Cimahi kurang memadai dari segi kuantitas namun cukup memadai dari segi kualitas.

Isu strategis Bappelitbangda Kota Cimahi tersebut dapat menghambat pencapaian target kinerja apabila tidak diatasi. Solusi atau upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasinya adalah:

1. Meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap prioritas pembangunan melalui *Focus Group Discussion*, khususnya personil penyusun perencanaan dalam upaya pendampingan sebelum Menyusun rancangan awal dokumen perencanaan;
2. Melaksanakan asistensi rancangan awal dokumen perencanaan dan/atau dokumen penganggaran, yang dilakukan dengan pejabat eselon II dan eselon III pada Perangkat Daerah;
3. Menyusun Keputusan Wali Kota untuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kota, dengan salah satu lingkup tugasnya adalah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota, serta menyampaikan rekomendasinya pada Kepala Perangkat Daerah agar diketahui dan ditindaklanjuti di tingkat Perangkat Daerah;
4. Menyusun metadata untuk manajemen data digital;
5. Mengoptimalkan peran sekretariat Forum Satu Data;
6. Membangun komitmen bersama antara Bappelitbangda dan BPKAD terkait prioritas belanja wajib dan mengikat, target capaian urusan wajib dan/atau SPM, serta prioritas indikator sasaran dan program, melalui rapat koordinasi tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), khususnya yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah;
7. Memperkuat pemahaman pemegang sektor pada Bappelitbangda tentang target capaian prioritas pembangunan sehingga dapat mengawal proses perencanaan dan penganggaran;
8. Menyusun peta kompetensi, rencana peningkatan kompetensi, serta evaluasi rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
9. Menyusun kembali analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk merevisi peta jabatan agar sesuai dengan kebutuhan.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi sepanjang Tahun 2024 dalam mewujudkan pencapaian target kinerja organisasi. Capaian kinerja Tahun 2024 tersebut kemudian dibandingkan dengan penetapan kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan identifikasi sejumlah ketimpangan kinerja (*performance gap*) sebagai bahan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian dokumen LKIP Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika sebagaimana dimaksud diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan dan isu strategis yang menjadi tantangan bagi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan rencana strategis, hasil reviu terhadap Renstra, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan hasil analisis pencapaian kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dan solusi terhadap permasalahan/kendala serta realisasi yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran Tahun 2024.



BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan secara menyeluruh mengenai muatan LKIP Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024, tantangan dan upaya perbaikan terhadap ketimpangan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah proses perencanaan dan pengelolaan kinerja organisasi publik atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi melalui pengembangan dan penerapan strategi, rencana, dan metode evaluasi kinerja.

Perencanaan kinerja instansi penting untuk memastikan bahwa organisasi publik atau instansi pemerintah dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, dan memenuhi harapan publik terhadap kinerja mereka. Selain itu, perencanaan kinerja juga dapat membantu organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.

2.1 Rencana Strategis

Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi periode Tahun 2023-2026 disusun untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan, sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis yang terjadi akhir-akhir ini. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut secara efektif dan efisien. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada bulan Oktober tahun 2022, serta adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, kemudian menjadi dasar pelaksanaan reviu terhadap Renstra Bappelitbangda dengan hasil reviu merumuskan revisi terhadap Indikator

Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kota Cimahi. Perubahan IKU tersebut kemudian dituangkan dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026 serta ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Adapun hasil rewiu terhadap Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

a. Uraian Indikator Tujuan sebelum dan sesudah rewiu

SEBELUM REWIU	
TUJUAN	INDIKATOR
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2. Nilai SAKIP Kota
SESUDAH REWIU	
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan	2. Indeks Reformasi Birokrasi

b. Uraian Sasaran sebelum dan sesudah rewiu

SEBELUM REWIU	
TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan
	2. Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam

	perencanaan pembangunan daerah
SESUDAH REVIU	
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah 3. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Sumber: Hasil Telaahan, 2024

Berdasarkan hasil reviu tersebut, maka keterkaitan visi dan misi Kota Cimahi dalam RPD Tahun 2023-2026 terhadap tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Cimahi terkait dengan pencapaian Misi Kesatu dan Kedua, yaitu:

Misi Kesatu: Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul, dengan tujuan yang telah disesuaikan menjadi:

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, dengan sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.

Misi Kedua: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan tujuan yang telah disesuaikan menjadi:

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah
 - b. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026, Bappelitbangda memiliki enam Indikator Kinerja Utama dan satu indikator penunjang urusan pemerintahan. Keterkaitan misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi
Tahun 2023-2026**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI I : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
MISI II : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan
				Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah
				Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda

Dengan telah ditetapkan Indiktor Kinerja Sasaran Perangkat Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026, maka IKU Bappelitbangda Kota Cimahi mengalami perubahan dari IKU tahun 2022.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kota Cimahi

INDIKATOR KINERJA (Renstra Tahun 2017-2022)	INDIKATOR KINERJA (Renstra Tahun 2023-2026)
1. Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	1. Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan
2. Persentase RENSTRA selaras dengan RPJMD	2. Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
3. Persentase RENJA selaras dengan RKPD	3. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah
4. Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	4. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda
5. Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD	5. Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Adapun keterkaitan sasaran, program dan indikator kinerja program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Keterkaitan Sasaran dan Program yang mengacu pada Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
A	B	C	D
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
A	B	C	D
2	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
			Persentase capaian indikator program
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan
			Persentase pengembangan inovasi
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
			Indeks Profesionalitas ASN
			Nilai IKM Perangkat Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar penyusunan Perjanjian Kinerja yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi. Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan target kinerja yang memuat sasaran kinerja dan IKU yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	
		Murni	Perubahan
A	B	C	D
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	100%
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100%	100%
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	85%	96,5%
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	75%	85%
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	65,0	79,32

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Triwulan I, II dan III Tahun 2024 serta memperhatikan realisasi dan capaian kinerja IKU Tahun 2023 terhadap target di akhir tahun rencana dalam dokumen Renstra (Tahun 2026), diketahui bahwa realisasi kinerja di tahun sebelumnya (2023) telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2024. Mempertimbangkan hal tersebut, maka Bappelitbangda pada saat menyusun dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 melakukan penyesuaian target kinerja sebagai bahan untuk menetapkan perubahan target kinerja Tahun 2024. Terdapat beberapa perubahan target IKU yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2024, di antaranya Persentase Capaian IKK menjadi 96,5% (realisasi

Tahun 2023 sebesar 95,26%), Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi 85% (realisasi Tahun 2023 sebesar 81,02%) dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Bappelitbangda menjadi 79,32 (realisasi Tahun 2023 sebesar 82,84.

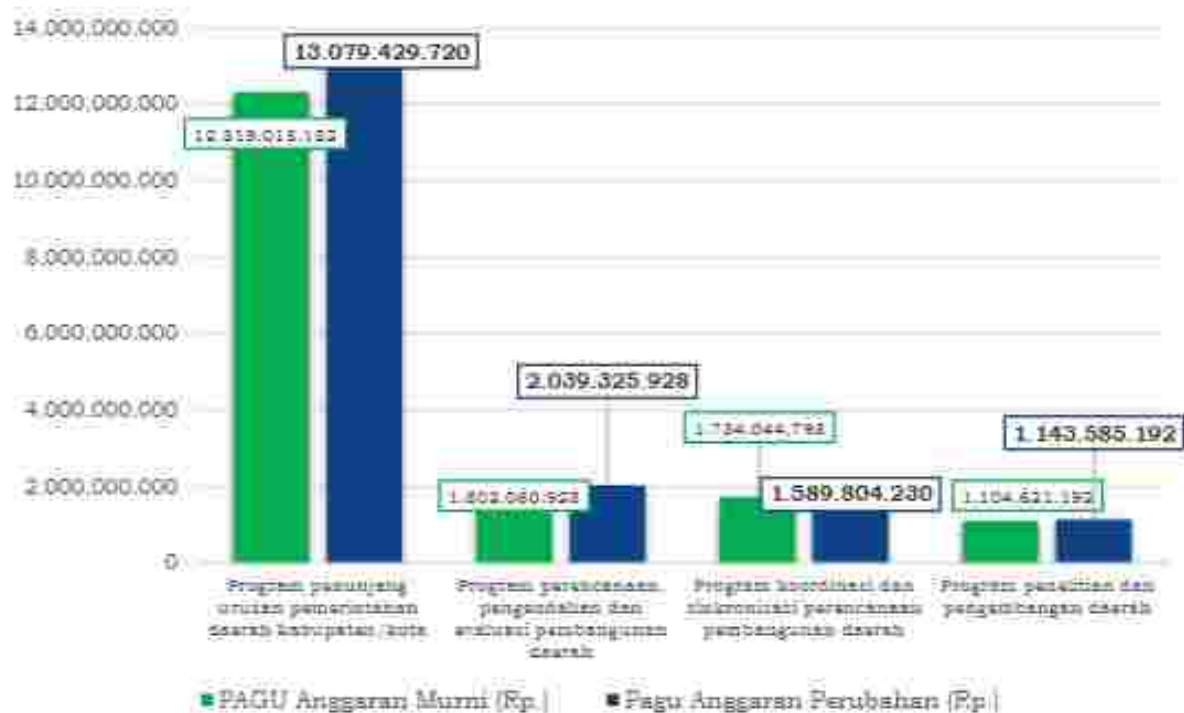
Selain Indikator Kinerja Utama tersebut, terdapat indikator program yang juga digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program, Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2024	
				Murni	Perubahan
A	B	C	D	E	F
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya tatakelola kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah	A 68 81,5	A 78,35 84,5
2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD Persentase capaian indikator program	100% 100% 85%	100% 100% 96,5%
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2024	
				Murni	Perubahan
A	B	C	D	E	F
		perencanaan tingkat kota	Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85%	96,5%
		Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA dengan perencanaan tingkat kota	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	100%	100%
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	85%	96,5%
		Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perencanaan tingkat kota	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	85%	96,5%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100%	100%
			Persentase pengembangan inovasi	60%	85%

Berdasarkan data indikator program dan target kinerja program Tahun 2024, diketahui selain perubahan target kinerja IKU juga terdapat perubahan target kinerja program Tahun 2024. Perubahan tersebut dilakukan melalui penyesuaian target berdasarkan evaluasi atas realisasi dan capaian kinerja program di Tahun 2023. Penyesuaian dan penetapan perubahan target kinerja program dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mengoptimalkan ketersediaan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangari.



Gambar 2.1 Alokasi Pagu Anggaran Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024

Dalam upaya mewujudkan target kinerja di Tahun 2024, Bappelitbangda memperoleh dukungan sumber daya anggaran yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 17.852.145.070,00 (*Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Rupiah*), jumlah tersebut meningkat 5,26% (Rp. 892.403.000,00) dari Pagu dalam APBD Murni yakni Rp. 16.959.742.070,00 (*Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh*

Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tuju Puluh Rupiah). Jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan 4 (empat) Program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub kegiatan. Secara lebih jelas, alokasi pendanaan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.

Selain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, terdapat tiga program prioritas yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda di wilayah Kota Cimahi, yaitu:

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang terdiri dari 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan;
2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari 3 kegiatan dan 18 sub kegiatan;
3. Program penelitian dan pengembangan daerah, yang terdiri dari 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi LKIP Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 pada bulan Maret 2024, Bappelitbangda memperoleh nilai 84,60 dengan predikat A. Hasil evaluasi LKIP Bappelitbangda oleh Inspektorat Kota Cimahi diuraikan melalui **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6 Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023

No.	Komponen yang Dinilai	Nilai Hasil Evaluasi	
		Bobot	Hasil Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	26,40
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	13,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,50
Nilai Hasil Evaluasi			86,40
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Sumber: Hasil Evaluasi Inspektorat, 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 oleh Inspektorat, disampaikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan.

Rekomendasi Perbaikan:

1. Perencanaan kinerja dalam dokumen Renja agar memuat perbaikan atau penyempurnaan yang memuat informasi perbaikan atau penyempurnaan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dari target yang direncanakan dalam Renstra, seperti inovasi, penambahan program kinerja atau peningkatan target kinerja; dan
2. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi untuk merumuskan penyusunan Peraturan Wali Kota mengenai Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja yang memuat informasi mengenai dasar, tujuan, tugas pokok dan tugas fungsi sesuai proses bisnis masing-masing OPD disertai penjelasan IKU, Perjanjian Kinerja, dan Monitoring Evaluasi.

Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan:

1. Dokumen Rancangan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 telah memuat informasi mengenai perbaikan/penyempurnaan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dari target yang direncanakan dalam Renstra, yaitu perubahan target kinerja berdasarkan hasil reviu terhadap indikator dan target kinerja (berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja Tahun 2023). Adapun informasi perbaikan/penyempurnaan untuk peningkatan kinerja terdapat pada Bab II Rancangan Renja Bappelitbangda Tahun 2025; dan
2. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi, pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja, sehingga diperlukan koordinasi tingkat kota untuk Menyusun peraturan wali kota yang memuat seluruh komponen evaluasi kinerja instansi pemerintah. Koordinasi lebih lanjut akan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja yang seharusnya dengan target kinerja yang diharapkan. Hasil pengukuran pencapaian kinerja kemudian dikategorikan ke dalam empat kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori	Kriteria
I	Lebih dari 85%	Berhasil (Sangat Baik)	A
II	71% sampai 85%	Berhasil (Baik)	B
III	50% sampai 70%	Cukup	C
IV	Kurang dari 50%	Kurang	D

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Pencapaian Tujuan Bappelitbangda Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	55%	57,30%	104,18%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	81,26	86,28	106,17%

Berdasarkan data dan informasi pada **Tabel 3.2** mengenai pencapaian Indikator Tujuan Tahun 2024, diketahui terdapat dua hal yang diukur oleh Bappelitbangda berdasarkan tugas dan fungsinya, yaitu Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Indeks Reformasi Birokrasi. Realisasi kinerja pada indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat mencapai 57,30% dari target 55% dengan capaian 104,18%. Sedangkan capaian kinerja pada Indikator Tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” pada Tahun 2024 sebesar 106,17%, dengan realisasi 86,28 poin terhadap target kinerja 81,26 poin. Capaian kinerja tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan dengan kategori sangat baik, namun dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang lebih baik di tahun depan maka perlu dilakukan reviu. Hal ini dikarenakan capaian kinerja melampaui target atau capaian lebih dari 100% yang mengindikasikan adanya ketidaktepatan dalam menentukan target (target kinerja terlalu rendah). Capaian tersebut telah memenuhi target, namun perlu upaya agar capaian kinerja tersebut lebih baik lagi di tahun mendatang, hal ini karena capaian target melampaui 100% yang dapat diindikasikan ketidaktepatan dalam menentukan target (target kinerja terlalu rendah).

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Sasaran ke 1 – Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan



Gambar 3.1 Infografis Capaian Kinerja Sasaran ke 1 Tahun 2024

Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Kota Cimahi menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam pembangunan melalui perumusan rencana pembangunan. Adapun capaian Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota Cimahi pada Tahun 2024 meningkat dengan capaian kinerja 100% dari target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Dari segi realisasi, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan meningkat 1,32% dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 sebesar 98,68% dan tahun 2024 sebesar 100%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan telah meningkat sebesar 1,32% dari capaian kinerja di tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Tahun 2024 telah memenuhi

target Tahun 2024-2026, yaitu sebesar 100% dari target akhir Renstra sebesar 100% dan terealisasi 100% pada tahun 2024.

Pada tingkat nasional dan tingkat provinsi, capaian kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan tidak dapat disandingkan dikarenakan adanya perbedaan formulasi perhitungan. Indikator yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dapat dilihat pada informasi berikut.

Tabel 3.3 Telaahan terhadap Capaian Kinerja Urusan Perencanaan di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat

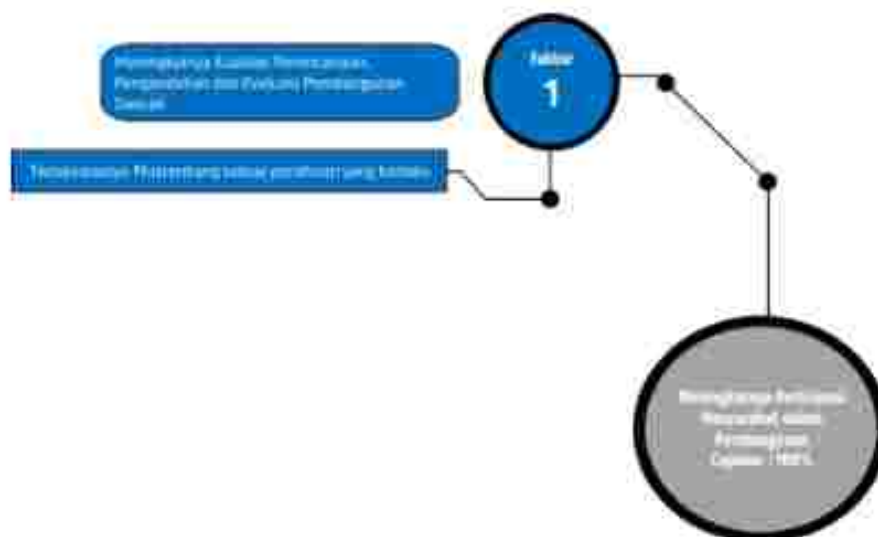
Instansi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024
Kementerian PPN/Bappenas	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	95
	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Nasional	96-100%
Bappeda Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang Bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	25,90 Poin
	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Jawa Barat yang dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	26,59 Poin

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Berdasarkan data dan informasi dalam **Tabel 3.3** mengenai telaahan terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada

Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Barat, maka indikator kinerja sasaran “Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan” tidak dapat disandingkan capaiannya. Hal tersebut dikarenakan perbedaan arah, kebijakan, tujuan serta sasaran yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan meningkatnya Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan disebabkan oleh Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang didukung oleh terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai peraturan yang berlaku dengan tingkat kehadiran dan usulan yang terakomodasi di tingkat kota mencapai 100%. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat RW, tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota. Selain melalui Musrenbang, pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui agenda kerja Pemerintah Kota Cimahi di Tahun 2025 sehingga dapat teridentifikasi usulan yang dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat berdasarkan Arah dan Kebijakan Pembangunan di tahun rencana.



Gambar 3.2 Faktor-faktor Pendorong yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Untuk mengakselerasi kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Tahun 2025, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian target dikarenakan target kinerja yang direncanakan sampai dengan akhir tahun rencana jangka menengah (2026) adalah 100%.



Gambar 3.3 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Cimahi didukung oleh terlaksananya Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melalui Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan serta 2 (dua) sub kegiatan yakni Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 2,36% atau setara Rp. 15.685.500,-. Adapun efisiensi ini diperoleh dari Pagu Anggaran Sebesar Rp. 663.369.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 647.710.500,-.

3.2.2 Sasaran ke 2 – Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan

Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan terdapat kesesuaian antar dokumen perencanaan, antara lain program dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah (PD) telah sesuai dengan RPJMD, program dalam dokumen Renja PD telah sesuai dengan

RKPD dan program dalam dokumen Renja PD telah sesuai dengan Renstra PD. Adapun capaian Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan pada Tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target 100% dan terealisasi 100%.

Dari segi realisasi, Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 100%. Berdasarkan aspek pencapaian kinerja, Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 (realisasi dan capaian lebih baik sebesar 0%).

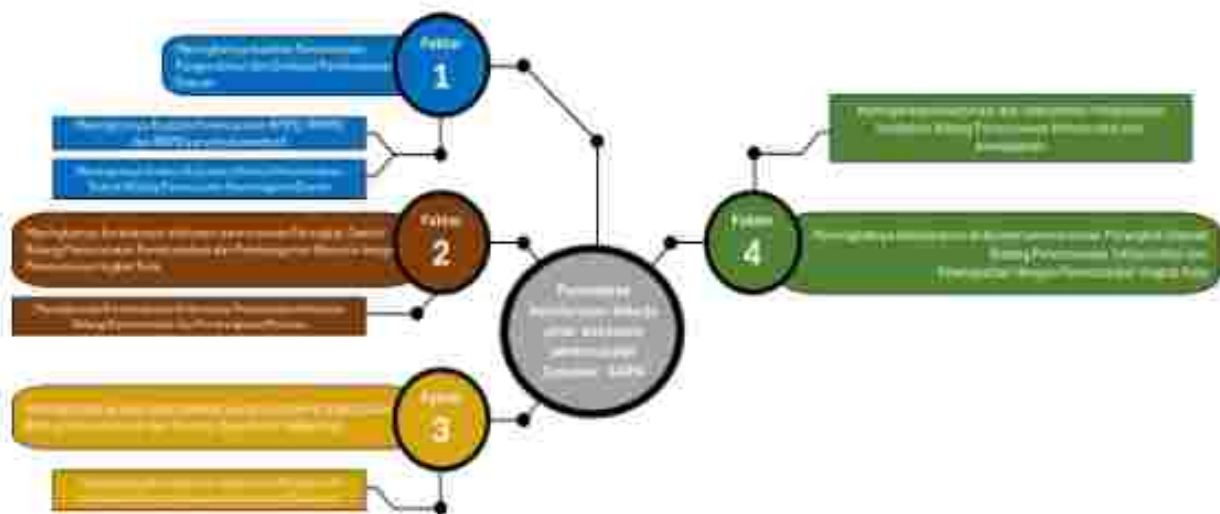
Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian kinerja pada indikator tersebut di tahun 2024 telah memenuhi target di Tahun 2024-2026, yaitu sebesar 100% dari target akhir dalam dokumen Renstra sebesar 100% dan telah terealisasi 100% di tahun 2024.



Gambar 3.4 Infografis Capaian Kinerja Sasaran ke 2 Tahun 2024

Untuk mengukur perbandingan capaian kinerja IKU Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan di tingkat Nasional dan Provinsi berdasarkan data dan informasi dalam **Tabel 3.3**, maka dapat disampaikan

bahwa perbandingan tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan indikator dan formulasi pengukuran kinerja. Kementerian PPN/Bappenas menggunakan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dalam sebagai tolak ukur terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan Bappeda Provinsi Jawa Barat menekankan keberhasilan kualitas perencanaan pembangunan diukur melalui nilai komponen perencanaan kinerja yang digunakan dalam penilaian SAKIP Provinsi Jawa Barat.



Gambar 3.5 Faktor-faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan

Tercapainya target kinerja Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan di Tahun 2024 tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi. Sebagaimana telah disampaikan mengenai faktor-faktor penyebab tercapainya target pada **Gambar 3.5**, diketahui bahwa keberhasilan pencapaian target kinerja disebabkan oleh Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Perencanaan tingkat Kota, Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam tingkat Kota dan Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Perencanaan

tingkat Kota. Faktor pendorong tersebut tidak terlepas dari dukungan meningkatnya kualitas perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang implementatif, meningkatnya analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Peran dari pegawai pada Bappelitbangda Kota Cimahi selaku pemegang sektor dalam memfasilitasi kegiatan koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan juga menjadi faktor pendukung lainnya yang mempengaruhi tercapainya keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan. Hal ini dikarenakan adanya fasilitas bagi pegawai dalam meningkatkan kompetensinya melalui keikutsertaan pada kegiatan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan (diklat) di bidang perencanaan.



Gambar 3.6 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada Indikator Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan

Untuk mengakselerasi kinerja Persentase Keselarasan Kinerja antar Dokumen Perencanaan di Tahun 2025, maka yang perlu dilakukan Bappelitbangda Kota Cimahi adalah mempertahankan pencapaian kinerja tanpa melakukan penyesuaian target. Hal ini dikarenakan target kinerja yang direncanakan sampai dengan akhir tahun rencana jangka menengah (2026) telah sesuai, yakni 100%.

Pencapaian kinerja pada indikator Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan yang dapat dipertahankan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan dua Program lima kegiatan. Program sebagaimana dimaksud meliputi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melalui kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan. Selain itu, terdapat dukungan pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA, serta Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Efisiensi anggaran dari tercapainya keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan melalui sejumlah program dan kegiatan tersebut adalah sebesar 2,94% atau setara Rp. 59.434.121,-. Adapun efisiensi tersebut diperoleh dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.110.562.428 dan terealisasi Rp. 2.051.128.307,-.

3.2.3 Sasaran ke 3 – Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci

Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan terdapat peningkatan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah di Tahun 2024.

Dari segi realisasi, Persentase Capaian IKK meningkat 6,7% dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 sebesar 95,26% dan tahun 2024 sebesar 101,96%. Meskipun menunjukkan tren realisasi yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi dari aspek pencapaian kinerja indikator Capaian IKK mengalami penurunan 13,42% dari capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 119,08% menjadi 105,66%. Penurunan pencapaian IKK di tahun 2024 dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat, di antaranya terdapat perubahan definisi operasional dan formulasi pengukuran kinerja yang terjadi di tahun berjalan, ketidakpatuhan perangkat daerah dalam melakukan penyesuaian target berbasis risiko dalam merencanakan target

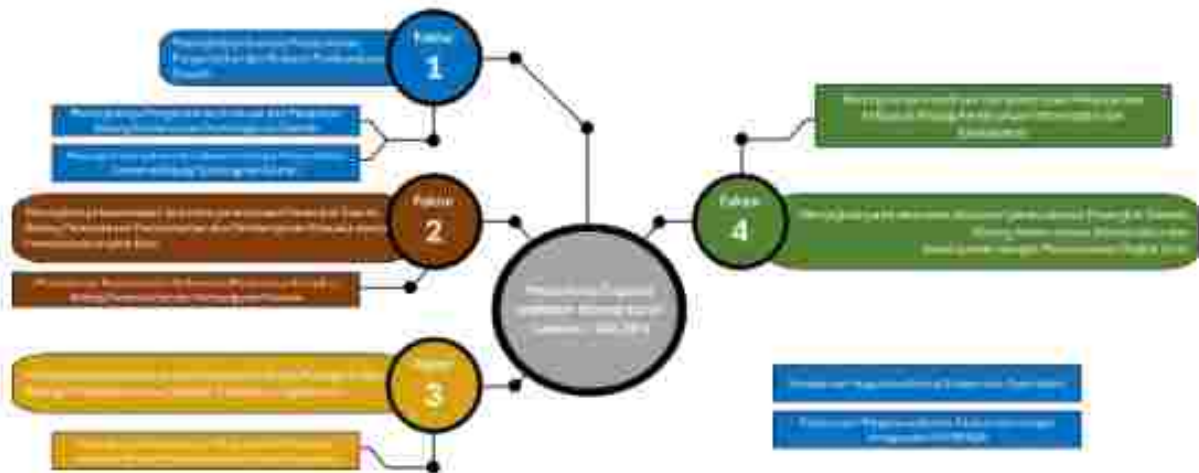
kinerja serta belum optimalnya target kinerja yang ditetapkan (kekhawatiran penyesuaian target akan berpengaruh pada menurunnya kinerja organisasi akibat target tidak tercapai).



Gambar 3.7 Infografis Capaian Kinerja Sasaran ke 3 Tahun 2024

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Persentase Capaian IKK Tahun 2024 telah melampaui target Tahun 2026, yaitu sebesar 107,33% dari target akhir Renstra sebesar 95% dan terealisasi 101,96% di Tahun 2024.

Berdasarkan data dan informasi pada **Tabel 3.3** mengenai telaahan terhadap capaian kinerja tingkat Nasional dan Provinsi, dapat disampaikan bahwa indikator dan formulasi pengukuran capaian kinerja target yang digunakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Barat berbeda dengan formulasi pengukuran pada pengukuran Persentase Capaian IKK. Kementerian PPN/Bappenas menetapkan IKU Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Nasional dalam mengukur kinerja pengendalian pembangunan pusat dan daerah, sedangkan Bappeda Provinsi Jawa Barat menetapkan indikator Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Provinsi untuk mengukur kualitas pengukuran kinerja pembangunan.



Gambar 3.8 Faktor-faktor Pendorong yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Persentase Capaian IKK

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan meningkatnya Persentase Capaian IKK disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Perencanaan tingkat Kota, Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan Perencanaan tingkat Kota, Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan dengan Perencanaan tingkat Kota. Faktor pendorong tersebut tidak terlepas dari Meningkatnya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Meningkatnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan. Peran dari pegawai pada Bappelitbangda Kota Cimahi selaku pemegang sektor dalam memfasilitasi kegiatan koordinasi, asistensi serta monitoring dan evaluasi juga menjadi faktor lain yang meningkatkan pencapaian target kinerja IKK di

tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kompetensi pemegang sektor yang sepanjang tahun 2024 telah diikuti sertakan dalam berbagai kegiatan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan (diklat) di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

Untuk mengakselerasi kinerja Persentase Capaian IKK di Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 90% menjadi lebih besar dari 90% yakni 97%. Pertimbangan penyesuaian target kinerja di Tahun 2025 juga memperhatikan pencapaian kinerja Capaian IKK pada tahun 2024 yang telah melampaui target kinerja di tahun 2025 dan 2026.



**Gambar 3.9 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada
Indikator Persentase Capaian IKK**

Meningkatnya capaian dan realisasi kinerja pada indikator Persentase Capaian IKK tidak terlepas dari dukungan dua Program, lima kegiatan dan sepuluh sub kegiatan. Program sebagaimana dimaksud meliputi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melalui Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah. Sedangkan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian

dan SDA, serta Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Efisiensi anggaran dari tercapainya target kinerja Persentase Capaian IKK pada tahun 2024 adalah sebesar 5,45% atau setara Rp. 56.337.817,-. Adapun efisiensi tersebut diperoleh dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 855.198.730,- dan terealisasi sebesar Rp. 798.860.913,-.

3.2.4 Sasaran ke 4 – Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan kondisi yang lebih baik sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 3.10**. Kondisi ini mengindikasikan hasil penelitian dan pengembangan telah dijadikan dasar dalam merumuskan rencana pembangunan daerah. Adapun capaian Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 101,31% dari target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 86,11%.



Gambar 3.10 Infografis Capaian Kinerja Sasaran ke 4 Tahun 2024

Dari segi realisasi, Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah meningkat 5,09% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 81,02%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami penurunan sebesar 6,72% dari capaian di tahun 2023 sebesar 108,03% dan pada tahun 2024 sebesar 101,31%.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026, capaian Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sudah melebihi target akhir Renstra (Tahun 2026), yakni sebesar 114,81% dan terealisasi 86,11% di tahun 2024.

Pada tingkat nasional dan tingkat provinsi, capaian kinerja Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan dapat disampaikan hasil perbandingannya sebagai berikut.

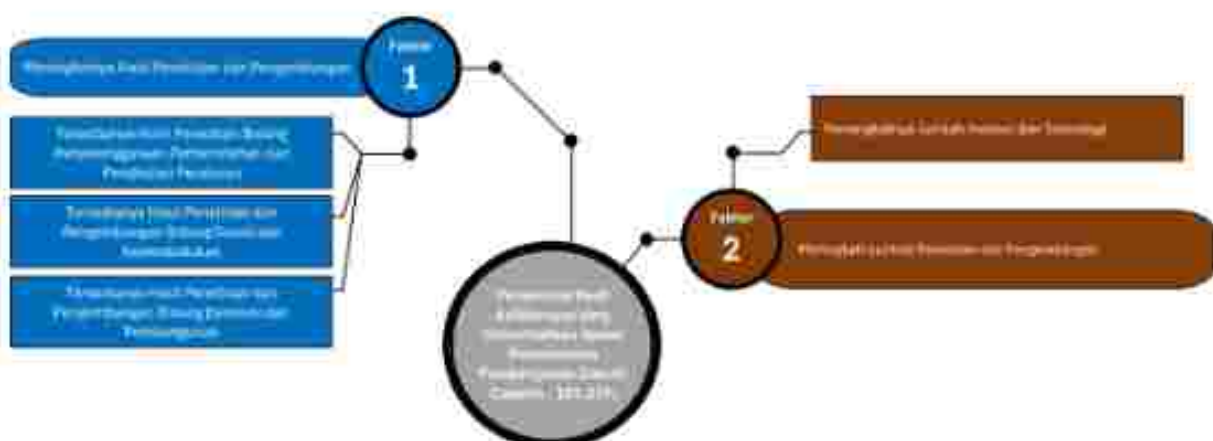
Tabel 3.4 Telaahan terhadap Capaian Kinerja Urusan Kelitbangan di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Instansi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024
Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIN)	Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	Inovasi yang dimanfaatkan masyarakat, industri dan badan usaha	250 Inovasi yang dimanfaatkan
		Rasio jumlah periset per sejuta penduduk	2.880
		Rasio anggaran riset non pemerintah terhadap anggaran riset pemerintah	0,35

Instansi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024
BP2D Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Kekayaan Intelektual yang terlindungi, Kematangan inovasi daerah, dan informasi publik Bidang Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100%

Sumber: Renstra BRIN Tahun 2022-2024 dan Renstra BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Berdasarkan data dan informasi pada **Tabel 3.4** dapat disampaikan bahwa, IKU terkait Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap IKU di tingkat nasional melalui BRIN tidak dapat disandingkan dikarenakan perbedaan indikator. Sedangkan perbandingan terhadap IKU di tingkat Provinsi melalui BP2D Provinsi Jawa Barat, perbandingan capaian indikator tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan perbedaan formulasi yang digunakan dalam menghitung capaian Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Jawa Barat.



Gambar 3.11 Faktor-faktor Pendorong yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan meningkatnya kinerja Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan

Pembangunan Daerah. Sebagaimana keterangan pada **Gambar 3.11** dapat disampaikan bahwa, Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dipengaruhi oleh Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan. Selain itu, faktor pendorong keberhasilan tersebut beberapa di antaranya ditandai dengan Tersedianya Hasil Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan melalui pelaksanaan pengkajian berbagai aspek mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan budaya serta ekonomi dan pembangunan. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan kemudian disosialisasikan dan didiseminasikan sehingga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perumusan rencana pembangunan di Kota Cimahi. Selain penelitian dan pengembangan, terlaksananya sejumlah kegiatan seperti *Innovation Hackathon Days*, Cimahi Motekar Award (ChiMA), keikutsertaan Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) dan Indonesian Government Awards (IGA) telah melahirkan inovasi yang mendorong tumbuhnya inovasi di Kota Cimahi.

Untuk mengakselerasi kinerja Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian target di tahun 2025 yang semula sebesar 75% menjadi 90%.

Meningkatnya Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh satu program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan empat kegiatan yang meliputi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis tersebut mencapai 2,35% atau setara Rp. 26.306.448,-. Adapun

efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran di tahun 2024 sebesar Rp. 1.143.585.192,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.117.278.744,-.



Gambar 3.12 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada Indikator Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

3.2.5 Sasaran ke 5 – Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan di tahun 2024 telah berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi. Adapun capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Bappelitbangda pada tahun 2024 yaitu sebesar 100% dari target sebesar 79,32 poin dan terealisasi 79,32 poin.

Dari segi realisasi, Nilai Evaluasi RB Bappelitbangda naik 0,62 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 82,84 poin dan pada tahun 2024 realisasinya sebesar 83,46 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Nilai Evaluasi RB Bappelitbangda juga mengalami penurunan sebesar 23,21% dibandingkan capaian di tahun 2023 yakni sebesar 128,43% dimana pada tahun 2024 capaiannya sebesar 105,22%.

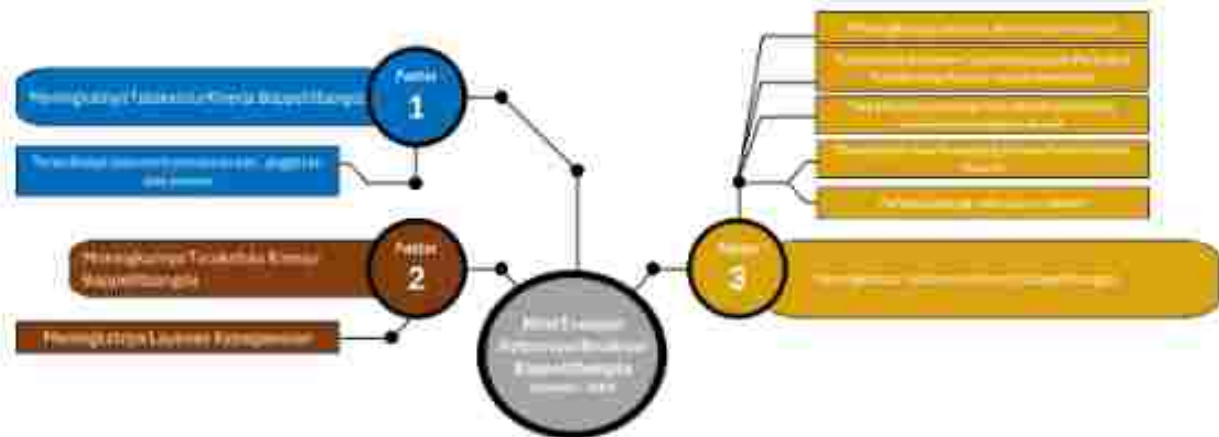


Gambar 3.13 Infografis Capaian Kinerja Sasaran ke 5 Tahun 2024

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Nilai Evaluasi RB Bappelitbangda Tahun 2024 sudah melampaui target akhir Renstra di tahun 2026 yaitu sebesar 126,45% dari target Renstra sebesar 66 poin dan telah terealisasi di tahun 2024 sebesar 83,46 poin.

Pada tingkat Provinsi Jawa Barat, Nilai Evaluasi RB Bappelitbangda Tahun 2024 masih berada di bawah capaian Indeks RB Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang memperoleh nilai 98,64 poin. Realisasi Nilai Evaluasi RB Bappelitbangda jika dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih lebih rendah 15,18 poin. Apabila disandingkan dengan capaian Indeks RB Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Nilai Evaluasi RB Bappelitbangda masih lebih rendah 2,82 poin dibandingkan capaian Pemerintah Kota di Tahun 2024 sebesar 86,28 poin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Nilai Evaluasi RB Bappelitbangda dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.14 Faktor-faktor Pendorong yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappedalitbangda

Berdasarkan data dan informasi pada **Gambar 3.14** dapat disampaikan bahwa pencapaian Nilai Evaluasi RB Bappedalitbangda dipengaruhi oleh Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Bappedalitbangda. Selain itu, terdapat unsur pendukung lainnya yang mempengaruhi peningkatan target kinerja di tahun 2024, di antaranya Tersedianya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Monev, Meningkatnya Layanan Kepegawaian dan Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Bappedalitbangda. Peningkatan berbagai aspek dalam mendorong kualitas reformasi birokrasi Bappedalitbangda Kota Cimahi tidak terlepas dari tersedianya dukungan sarana dan prasarana penunjang bagi pegawai dalam melaksanakan tugas seperti penambahan *router* Wifi, ruang rapat yang memadai, dan penambahan peralatan dan mesin (komputer, *printer* dan *scanner*). Faktor pendukung lain dari ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappedalitbangda di Tahun 2024 beberapa di antaranya adalah:

1. Tercapainya nilai SAKIP Tahun 2024 yang dibuktikan dengan peningkatan sejumlah aspek yang diukur, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatnya realisasi anggaran yang mendukung ketercapaian seluruh IKU perangkat daerah;
3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

4. Meningkatnya kepatuhan pencatatan Pengadaan Barang dan Jasa pada SPSE;
5. Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN Bappelitbangda;
6. Komitmen publikasi data statistik sektoral pada portal Open Data Cimahi;
7. Komitmen pimpinan dalam penyusunan produk hukum daerah, dibuktikan dengan tingkat kehadiran pimpinan tinggi pada kegiatan pembahasan;
8. Meningkatnya digitalisasi Arsip;
9. Pelaksanaan dan pengendalian Rencana Aksi RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan dan Pengendalian Inflasi;
10. Inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai *core business* organisasi.



Gambar 3.15 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 pada Indikator Nilai Evaluasi RB Bappelitbangda

Untuk mengakselerasi kinerja Nilai Evaluasi RB Bappelitbangda pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 65,5 poin menjadi lebih besar yakni 82. Pertimbangan penyesuaian target kinerja didorong oleh realisasi Nilai Evaluasi RB Bappelitbangda pada tahun 2024 sebesar 79,32 yang sudah melampaui target kinerja di Tahun 2025 sebesar 65,5.

Tercapainya target kinerja Nilai Evaluasi RB Bappelitbangda didukung oleh terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang disertai pelaksanaan tujuh kegiatan dan dua puluh empat sub kegiatan. Efisiensi anggaran dari pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik yang salah satunya diukur dengan Nilai Evaluasi RB Bappelitbangda adalah sebesar 7,42% atau setara Rp. 371.212.391,-. Adapun efisiensi tersebut diperoleh dari jumlah pagu anggaran di tahun 2024 sebesar Rp. 13.079.429.720,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.708.217.329,-.

3.2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran keberhasilan penggunaan sumber daya dalam suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semakin sedikit jumlah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses maka dapat dikatakan semakin efisien atau dengan kata lain memanfaatkan sumber daya dengan lebih bijak, hemat dan tidak boros namun tetap menghasilkan sesuatu secara maksimal. Analisis efisiensi dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja yang capaiannya telah sesuai atau melebihi 100%, kemudian disandingkan dengan penggunaan anggaran atas indikator tersebut. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran dalam pencapaian target kinerja pada setiap IKU sebelumnya telah disampaikan. Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan disampaikan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran secara keseluruhan dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian setiap indikator kinerja.

Setiap unit kerja pada Bappelitbangda yang terdiri dari Sekretariat dan 5 (lima) Bidang terdiri dari 1 Orang Pejabat Struktural, terkecuali pada Sekretariat dimana terdapat 3 orang Pejabat Struktural (Administrator dan Pengawas). Dalam menjalankan tugasnya, setiap Bidang dibantu oleh dukungan SDM Fungsional Perencana, terkecuali pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, fungsional yang membantu pelaksanaan tugas di bidang tersebut terdiri dari Peneliti dan Analis Kebijakan Ahli Muda. Ketersediaan

SDM Fungsional pada setiap bidang disesuaikan memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan di bidang perencanaan dan kelitbangan. Selain fungsional, terdapat dukungan sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari analis perencana, evaluasi dan pelaporan (Sekretariat), analis perencanaan strategis (Bidang P3M, Bidang Pesda dan Bidang Infrastwil), dan analis penelitian dan pengembangan (Bidang Litbang).



Gambar 3.16 Dukungan Sumber Daya Manusia Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Kota Cimahi

Selain dukungan pejabat fungsional perencana dan kelitbangan, di setiap bidang juga dibantu oleh pelaksana, tenaga non ASN serta tenaga ahli. Secara keseluruhan jumlah pegawai pada Bappelitbangda baik Struktural, Fungsional, Pelaksana dan Non ASN adalah sebanyak 67 orang. Memperhatikan dinamika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan serta kelitbangan, jumlah tersebut belum sepenuhnya optimal dikarenakan kompetensi SDM aparatur di bidang perencana dan kelitbangan belum memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Selain itu, berdasarkan hasil analisis beban kerja masih perlu ditelaah lebih lanjut sesuai peta jabatan eksisting.

Setiap Bidang Perencanaan pada Bappelitbangda menjadi fasilitator bagi perangkat daerah dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi

perencanaan, dimana Bidang P3M mengampu 13 Perangkat Daerah, Bidang Pesda mengampu 9 Perangkat Daerah dan Bidang Infraswil mengampu 8 Perangkat Daerah, dengan total keseluruhan 30 Perangkat Daerah. Terkecuali pada Bidang P3E dan Bidang Litbang, masing-masing mengoordinasikan rangkaian perencanaan serta penelitian dan pengembangan di tingkat Kota. Adapun aktivitas yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda dengan dukungan struktur organisasi beserta SDM yang terdapat di dalamnya diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi, asistensi dan monev kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang meliputi:
2. Pengumpulan data perencanaan program dan kegiatan agar selaras dengan RKP Nasional, RKPD Provinsi, serta usulan masyarakat;
3. Pendampingan penyusunan perencanaan tahunan/lima tahunan;
4. Asistensi perencanaan program dan kegiatan;
5. Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Selain itu, dilakukan pula kegiatan menyusun dokumen perencanaan tingkat kota, yaitu Perubahan RKPD Tahun 2024, RKPD Tahun 2025, serta melakukan monev terhadap hasil RKPD dan RPD juga Monev Kebijakan RKPD;
8. Melakukan kegiatan kelitbangan dan pengelolaan inovasi dalam upaya pemenuhan indeks-indeks kelitbangan dan kompetisi inovasi tingkat kota, provinsi dan nasional;
9. Melakukan kajian Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai bahan perumusan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID);
10. Pengelolaan Risiko Tingkat Pemda dan Bappelitbangda;
11. Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP; dan
12. Maturitas SPIP terintegrasi;
13. Unit Pembina Jabatan Fungsional Perencana, Peneliti, Perekayasa dan Analis Kebijakan; dan
14. Komite Manajemen Risiko tingkat Pemerintah Daerah.

Selain analisis atas efisiensi penggunaan SDM dalam pelaksanaan tugas, berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2024 pada Bappelitbangda Kota Cimahi:

Tabel 3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Unit Kerja	Aktivitas	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Bidang P3E	1. Pelatihan Kader Perencana Pembangunan & Gebyar Penyelenggaraan Tahapan Musrenbang RKPD (<i>Kick Off</i>, Teknokratik, Konsultasi Publik, Pra Musrenbang dan Musrenbang 2. Penyusunan RKPD 2025 dan Perubahan RKPD 2024 3. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan Analisis Data Penunjang Penyusunan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 4. Manajemen Data Kota Cimahi untuk Forum 1 Data: Pembinaan Pemanfaatan Data 5. Penyusunan <i>baseline data</i> perencanaan pembangunan 6. Monev Kebijakan RKPD, P-RKPD, Monev RPD (per tahun) dan RKPD (per triwulan), Monev RPJPD, Monev SPM, Monev DAK, Monev Bantuan Provinsi	2.039.325.928	1.971.607.140
Bidang P3M, Bidang Pesda dan Bidang Infrastwil	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PD 2. Asistensi Dokumen Perencanaan PD 3. Monitoring dan Evaluasi Sektoral 4. Menyusun Kajian Perencanaan 5. SDGs, Bimtek KMED 6. SSK, Simpul Jaringan 7. FGD Identifikasi Permasalahan dan Alternatif Solusi bersama <i>Stakeholders</i>	1.143.585.192	1.526.092.580
Bidang Litbang	1. Pengelolaan Data Penelitian 2. Fasilitasi Penelitian 3. Pengelolaah Data Inovasi	1.143.585.192	1.117.278.744

Unit Kerja	Aktivitas	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	4. Fasilitasi HAKI 5. Pelaksanaan ChiMA Award 6. Diseminasi Hasil Kelitbangan (IDSD, IID/IGA, IPKD, RIDa) 7. Melaksanakan Kerja Sama Kelitbangan 8. Penyusunan <i>Backgroud Study</i> 9. Kajian terkait Infrastruktur dan <i>City Branding</i> 10. Penelitian dan Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dalam Kelitbangan 11. Kajian Produk Unggulan Daerah (PUD)		
Sekretariat	1. Perencanaan Internal Bappelitbangda 2. Fasilitasi Sekretariat Komite Pengelola Risiko dan Koordinator Teknis UPR Pemda 3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja 4. Pelaporan Capaian Kinerja 5. Pemenuhan SAKIP, Pengelolaan Risiko, Indikator RB General, SPIP dan Evaluasi Kota Layak Anak 6. Fasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN 7. Pelaporan Keuangan Bulanan/Semesteran/Tahunan 8. Fasilitasi Umum, Rumah Tangga dan Pengembangan Kompetensi Kepegawaian ASN 9. Fasilitasi Unit Teknis Pembina Jabatan Fungsional Perencana, Analis Kebijakan dan Peneliti	13.079.429.720	12.708.217.329

Dukungan Sumber Daya Anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17.852.145.070,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.323.195.793,-. Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk pendampingan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap triwulan dengan pendampingan terhadap 30 (tiga puluh) perangkat daerah dan 15 (lima belas) kelurahan. Sedangkan di

Bidang Kelitbangan, kegiatan pelayanan dilakukan dalam rangka fasilitasi urusan penelitian dan pengembangan terhadap unsur akademisi, sekolah, masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan lainnya. Alokasi anggaran tersebut juga sudah termasuk penyediaan gaji dan tunjangan bagi 50 (lima puluh) pegawai ASN, fasilitasi administrasi umum dan penyusunan program serta pelaporan. Dengan dukungan Sumber Daya Anggaran tersebut, secara keseluruhan realisasi anggaran di tahun 2024 mencapai 97,04% yang berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja dengan rata-rata pencapaian kinerja strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan lebih dari 100%.

3.2.7 Dukungan Capaian Indikator Program terhadap Pencapaian Kinerja Strategis Bappelitbangda Kota Cimahi

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja yang disampaikan melalui data dan informasi pada sejumlah infografis pada sub bab sebelumnya, keberhasilan pencapaian target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak terlepas dari dukungan capaian kinerja program Bappelitbangda Kota Cimahi di Tahun 2024. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja program Bappelitbangda Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Program Bappelitbangda Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100%	100%	100%
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian indikator program	96,5%	98,68%	102,26%

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%
		Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	96,5%	97,8%	101,35%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	100%	100%	100%
		Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	96,5%	99,11%	102,70%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%
		Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	96,5%	99,14%	102,74%
		Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100%	100%	100%
		Persentase pengembangan inovasi	85%	100%	117,65%
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100%	100%	100%
		Persentase pengembangan inovasi	85%	100%	117,65%

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	100%
		Indeks Profesionalitas ASN	78,35	90,67	115,72%
		Nilai IKM Perangkat Daerah	84,5	84,66	100,19%

Sumber: Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan data dan informasi yang disampaikan pada **Tabel 3.6**, terdapat 14 (empat belas) indikator kinerja program yang ditetapkan. Seluruh target pada indikator kinerja program tersebut telah sepenuhnya tercapai dengan rata-rata capaian kinerja melebihi 100%. Capaian indikator program tersebut dapat dikategorikan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja yang telah melebihi target atau melebihi 100% di tahun 2024 akan menjadi bahan untuk ditelaah lebih lanjut, terutama dalam menentukan target kinerja perencanaan yang lebih optimal pada tahun perencanaan selanjutnya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap formulasi pengukuran capaian indikator kinerja, beberapa target yang telah terlampaui terjadi perubahan formulasi pengukuran, baik dikarenakan perubahan kebijakan maupun perubahan data yang digunakan dalam pengukuran. Perubahan formulasi dan atau data tersebut menjadi bahan untuk melakukan reviu indikator kinerja dan hasil reviu akan menjadi dasar dalam menyesuaikan target kinerja pada dokumen perencanaan selanjutnya.

3.2.8 Upaya Perbaikan dalam Mengakselerasi Kinerja Strategis pada Bappelitbangda Kota Cimahi

Berdasarkan hasil analisis atas capaian kinerja Bappelitbangda pada tahun anggaran 2024, terdapat beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja strategis organisasi di tahun 2025. Upaya perbaikan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.17 Upaya Perbaikan dalam Meningkatkan Kinerja Bappedalitbangda pada Tahun 2025

Terdapat delapan upaya perbaikan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 dalam rangka meningkatkan kinerja strategis organisasi pada Bappelitbangda, di antaranya:

1. Pengelolaan Data

Memperhatikan capaian kinerja pada indikator Persentase Capaian IKK di Tahun 2024, maka Bappelitbangda akan mengoptimalkan pengelolaan data sektoral perangkat daerah sesuai dengan peran Bappelitbangda sebagai Sekretariat Forum Satu Data Kota Cimahi. Berdasarkan hasil pengukuran Capaian IKK di Tahun 2024, terdapat anomali dalam pengukuran kinerja IKK di Kota Cimahi yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, Bappelitbangda akan menyusun basis data capaian kinerja secara *time series* sebagai bentuk dokumentasi pengukuran kinerja sebagai *input* untuk meningkatkan kualitas kinerja sesuai tugas, fungsi dan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing perangkat daerah.

2. Perbaikan Sistem

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, Bappelitbangda Kota Cimahi didukung oleh aplikasi berbasis teknologi dan informasi untuk memfasilitasi perangkat daerah dalam hal penyusunan

dokumen perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan data penelitian dan pengembangan melalui aplikasi SIPD RI, Simrenda dan Piramida. Untuk memudahkan pengguna yang dalam hal ini adalah perangkat daerah, maka Bappelitbangda akan meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi informasi melalui perbaikan sistem dan bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi. Hal ini dilakukan agar perangkat daerah selaku pengguna mendapatkan kemudahan untuk mengakses aplikasi tersebut yang akan digunakan dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pendokumentasian hasil inovasi dan riset daerah.

3. Reviu dan Revisi Proses Bisnis

Bappelitbangda Kota Cimahi telah memiliki Proses Bisnis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappelitbangda Kota Cimahi Nomor 800/Kep.502/Bappelitbangda/2022. Proses Bisnis merupakan acuan alur kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kota Cimahi terkait urusan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah. Memperhatikan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berdasarkan hasil capaian kinerja di Tahun 2024, maka Bappelitbangda akan melakukan reviu atas proses bisnis tersebut. Hasil reviu kemudian menjadi masukan dalam melakukan revisi proses bisnis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan.

4. Reviu dan Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP)

Bappelitbangda Kota Cimahi telah memiliki SOP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappelitbangda Kota Cimahi Nomor 800/Kep.512/Bappelitbangda/2022. SOP merupakan pedoman bagi seluruh pegawai Bappelitbangda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja utama serta memperhatikan dinamika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi, maka guna mengoptimalkan pelayanan publik perlu dilakukan reviu dan revisi SOP di Tahun 2025. Reviu dan revisi SOP perlu dilakukan dikarenakan adanya perubahan sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi Bappelitbangda dalam menjalankan tugas dan fungsi, sehingga melalui reviu dan revisi SOP diharapkan capaian kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih optimal.

5. Optimalisasi Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Bappelitbangda dalam memfasilitasi perangkat daerah pada proses penyusunan dokumen perencanaan telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan pendampingan melalui asistensi penyusunan dokumen perencanaan yakni Rencana Kerja (Renja), asistensi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta pendampingan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) dokumen perencanaan. Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja tahun 2024, masih ditemukan ketidaktepatan perangkat daerah dalam menetapkan target kinerja baik di level strategis (IKU) maupun operasional (Indikator Kinerja Program). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di tahun 2025, maka Bappelitbangda akan mengoptimalkan pelaksanaan asistensi dokumen perencanaan melalui peningkatan kapasitas bagi pegawai di setiap unit kerja. Selain itu, optimalisasi juga dilakukan melalui perbaikan mekanisme dan alur pelaksanaan asistensi yang juga didukung dengan keberadaan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi berbasis sistem (Simrenda).

6. Optimalisasi Pengukuran Kinerja

Mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Persentase Capaian IKK di Tahun 2024, dengan persentase hasil capaian kinerja telah melebihi target (lebih dari 100%), maka Bappelitbangda pada tahun 2025 akan mengoptimalkan proses pengukuran kinerja. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas pemegang sektor dalam melakukan pendampingan melalui kegiatan asistensi penyusunan

dokumen perencanaan serta fasilitasi monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan setiap triwulan.

7. Peningkatan Pengendalian Penetapan Dokumen Perencanaan

Dalam upaya menetapkan target kinerja, selain mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, juga perlu penelaahan terhadap formulasi indikator dan proyeksi target kinerja. Setelah proses asistensi penyusunan dokumen perencanaan serta hasil evaluasi capaian kinerja, Bappelitbangda perlu melakukan pengendalian dalam tahapan penetapan dokumen untuk memastikan kesesuaian target yang telah ditetapkan.

8. Pedoman Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

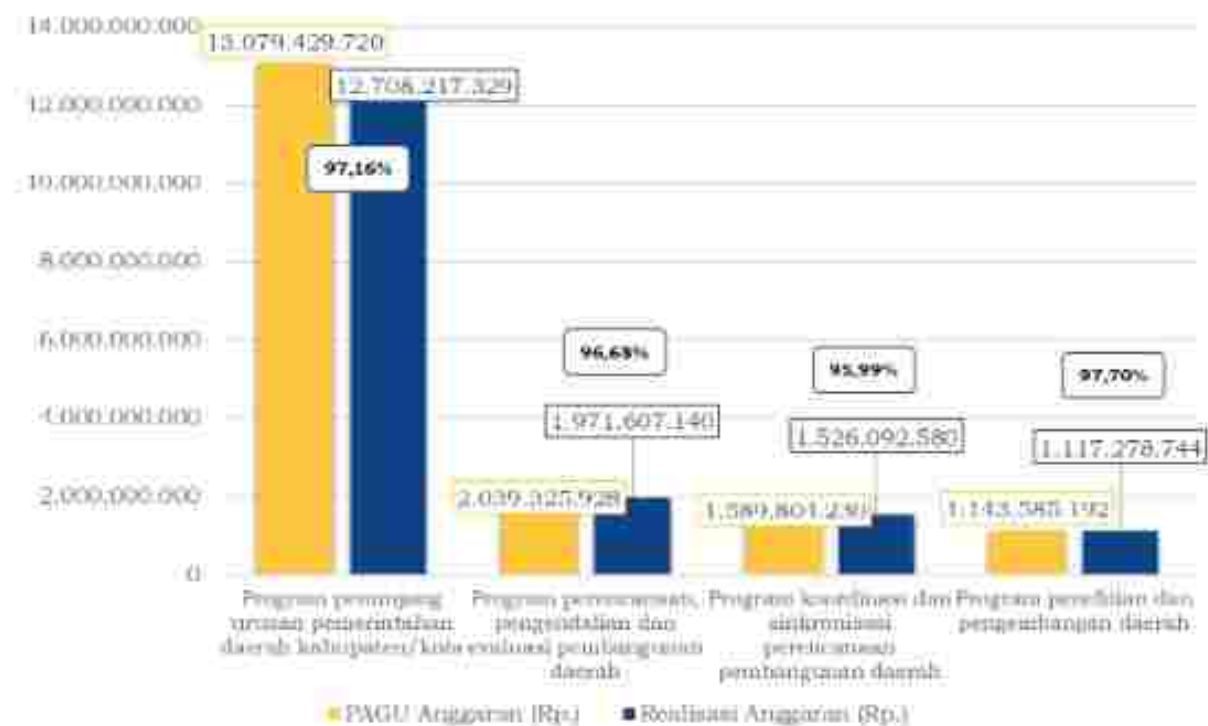
Mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Persentase Capaian IKK di Tahun 2024, dimana terdapat perubahan definisi operasional dan formulasi indikator yang digunakan, keengganan dan ketidaktepatan perangkat daerah dalam merencanakan target kinerja, maka Bappelitbangda akan mengoptimalkan proses pengukuran kinerja. Optimalisasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penyusunan pedoman pengukuran kinerja sehingga mempermudah perangkat daerah dalam merumuskan target dan menghitung capaian kinerja.

9. Hilirisasi Hasil Kelitbangan

Hasil kelitbangan memiliki nilai manfaat bila dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan perencanaan selanjutnya. Selain itu, hasil kelitbangan harus dapat diterapkan. Melalui hilirasi, siklus kelitbangan dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap kebijakan perencanaan. Salah satu upaya sinkronisasi kegiatan kelitbangan dengan perencanaan maka perlu disusun dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) Kota Cimahi Tahun 2025-2029.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang berorientasi pada pencapaian target kinerja yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Bappelitbangda Kota Cimahi, terdapat dukungan sumber daya anggaran yang memadai. Untuk itu, pada tahun 2024, pagu anggaran penunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappelitbangda disampaikan sebagai berikut.



Gambar 3.18 Pagu Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2024

Capaian realisasi anggaran pada tahun 2024 mencapai 97,04%, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 yaitu sebesar 93,73% maka terdapat peningkatan realisasi keuangan sebesar 3,31%. Peningkatan realisasi anggaran ini berimplikasi pada peningkatan capaian dan realisasi target kinerja di Tahun 2024, meskipun masih terdapat realisasi kinerja yang capaiannya melebihi 100%. Selain itu, berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat program yang efisiensinya cukup tinggi, yaitu penyediaan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 menyajikan sejumlah data dan informasi terkait keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis di tahun 2024 yang tercermin pada capaian sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, capaian strategis telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) dan jangka menengah yakni Rencana Strategis (Renstra). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha, peneliti dan *stakeholders* terkait lainnya. Data Laporan Kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Indikator yang menjadi acuan pengukuran target indikator kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan IKU yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026;
2. Indikator dalam perjanjian kinerja tahun 2024 urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian sebesar 102,44%. Capaian tersebut menurun jika dibandingkan dengan rata-rata capaian di tahun 2023 sebesar 110,84%. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh adanya penyesuaian dan penetapan target kinerja perubahan dengan mempertimbangkan capaian di tahun 2024, target di akhir perencanaan jangka menengah dan capaian kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II;
3. Pencapaian IKU tidak terlepas dari kontribusi realisasi dan capaian target kinerja Program di tahun 2024, seluruh target kinerja program telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan;

4. Diperlukan Reviu terhadap Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026 serta capaian atas sejumlah indikator dan target kinerja baik IKU, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan. Memperhatikan hasil analisis mengenai pengukuran realisasi dan capaian kinerja di Tahun 2024, diperlukan sejumlah perbaikan untuk menghindari terjadinya anomali pencapaian kinerja yang jauh melampaui target (capaian lebih dari 100%). Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terukur dan menggambarkan capaian kinerja Bappelitbangda terhadap RPD Kota Cimahi dan Renstra Tahun 2023-2026;
5. Realisasi anggaran belanja Tahun 2024 secara keseluruhan sebesar Rp. 17.323.195.793,- dengan persentase capaian kinerja anggaran sebesar 97,04% dari pagu anggaran Rp. 17.852.145.070,-. Capaian kinerja tersebut meningkat dibandingkan capaian di tahun sebelumnya sebesar 93,73%. Meningkatnya capaian kinerja anggaran selaras dengan ketercapaian seluruh target IKU di Tahun 2024.

4.1 Tantangan

Terdapat sejumlah tantangan yang perlu ditangani sebagai bahan peningkatan kualitas kinerja organisasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, yaitu di antaranya:

1. Kualitas perencanaan dan penetapan target kinerja;
2. Kualitas pengukuran kinerja;
3. Perencanaan pembangunan daerah memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi;
4. Integrasi manajemen risiko dalam proses bisnis perencanaan pembangunan;
5. Ketersediaan dan pemanfaatan metadata perencanaan;
6. Pemanfaatan hasil kelitbangsan dalam menunjang perencanaan dan perumusan kebijakan;

7. Hilirasi hasil penelitian dan pengembangan inovasi serta teknologi dalam menyelesaikan permasalahan kota;
8. Keberlanjutan inovasi;
9. Peningkatan kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan; dan
10. Optimalisasi inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kualitas pelayanan publik.

4.2 Upaya Perbaikan

Terhadap sejumlah tantangan yang akan dihadapi Bappelitbangda dalam menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan maka upaya perbaikan yang akan dilakukan yaitu di antaranya:

1. Melakukan telaahan terhadap *cascading* dan *crosscutting* kinerja RPD Tahun 2023-2026 untuk memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan tahunan;
2. Meningkatkan pemahaman pemegang sektor dan Perangkat Daerah terhadap *cascading* atau keselarasan kinerja serta prioritas pembangunan melalui *Focus Group Discussion*, khususnya personil yang mengemban tugas fasilitasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan;
3. Melaksanakan koordinasi secara berkala untuk menelaah nomenklatur indikator dan target kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai ketentuan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan keselarasan kinerja antara dokumen perencanaan tingkat kota dan perangkat daerah;
4. Melaksanakan asistensi rancangan awal dokumen perencanaan dan/atau dokumen penganggaran secara intensif dan bertahap melalui kegiatan *desk* dengan melibatkan pemegang sektor dari setiap bidang;
5. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan tingkat kota dan perangkat daerah secara simultan, terkoordinasi dan tersinkronisasi;

6. Melakukan integrasi aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Perencanaan, Penganggaran dan Data dengan aplikasi SIMRENDa dalam tahapan pengendalian dan evaluasi;
7. Menyusun metadata untuk manajemen data digital serta optimalisasi peran Bappelitbangda sebagai Sekretariat Forum Satu Data Kota Cimahi;
8. Integrasi perencanaan dan kelitbangdan berdasarkan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah agar sesuai dengan upaya penyelesaian permasalahan tingkat kota;
9. Peningkatan tata kelola kerja sumber daya aparatur di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan melalui peran Bappelitbangda sebagai Unit Teknis Pembina Jabatan Fungsional Perencana, Analis Kebijakan, Peneliti dan Perekayasa.

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan pedoman peningkatan kualitas kinerja Bappelitbangda pada tahun berikutnya dalam upaya menunjang pencapaian visi dan misi Kota Cimahi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 ini disusun untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Cimahi, Februari 2025
KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI,

ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730413 199803 1 006



LAMPIRAN

BERITA ACARA
HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAH
TRIWULAN I TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima Bulan April Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Nomor 900/Kep.01/Bappelitbangda dan Nomor 900/Kep.02 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Bappelitbangda Kota Cimahi serta Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi, dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:
 - a. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan, capaian kinerja dihitung berdasarkan jumlah usulan prioritas Musrenbang tingkat Kota yang dapat diakomodir dalam RKPD dibagi dengan jumlah usulan Musrenbang tingkat kota dikali 100. Capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.
Capaian dihitung pada triwulan I bersamaan dengan rangkaian musrenbang yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2024. Faktor yang mendorong tercapainya kinerja yaitu:
 - 1) Usulan yang disampaikan merupakan kewenangan pemerintah kota sehingga dapat terakomodir;
 - 2) Usulan yang disampaikan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
 - b. Persentase Keselarasan Kinerja antar Dokumen Perencanaan, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0% yaitu tercapai 0% dari target 100%. Capaian dihitung berdasarkan rata-rata persentase kesesuaian prioritas antara RKPD dengan RPJMD, persentase kesesuaian antara RKPD dengan RKPD Provinsi Jawa Barat, persentase kesesuaian program antara Renstra dengan RPJMD, persentase kesesuaian program antara Renja dengan RKPD, persentase kesesuaian program antara Renja dengan Renstra.

Capaian baru dapat dihitung pada triwulan ke II dan III dikarenakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2025 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) masih dalam tahap rancangan awal.

Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut, pelaksana program dan kegiatan akan tetap melaksanakan koordinasi, asistensi serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan ketercapaian target kinerja di akhir tahun.

- c. Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 85%. Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan rata-rata capaian IKK, yaitu Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RKPD.

Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut, pelaksana program dan kegiatan akan tetap melaksanakan koordinasi, asistensi serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan ketercapaian target kinerja di akhir tahun.

- d. Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0% yaitu tercapai 0% terhadap target 75%. Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan perolehan rata-rata dari:

- 1) Persentase Hasil kelitbangan tersosialisasi / terdiseminasi;
- 2) Persentase Hasil pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan;
- 3) Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen perencanaan dan atau perumusan kebijakan.

Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut, dapat disampaikan bahwa seluruh tahap kelitbangan masih dalam proses persiapan. Pelaksana program dan kegiatan akan tetap melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, koordinasi dan konsultasi dengan *stakeholders* terkait untuk memastikan ketercapaian target kinerja di akhir tahun.

- e. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda, capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan nilai hasil evaluasi Inspektorat Kota Cimahi.

Menindaklanjuti upaya pencapaian kinerja tersebut, pelaksana program dan kegiatan akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah untuk melengkapi lembar kerja evaluasi sesuai ketentuan evaluasi dari Kementerian PAN-RB.

2. Capaian Kinerja Program sebagai berikut:

- a. Persentase Unsur Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Musrenbang Kota, dihitung berdasarkan jumlah unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang tingkat kota dibagi unsur masyarakat di Kota Cimahi dikalikan 100. Capaian kinerja terhadap indikator program 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.
- b. Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD (dalam hal ini berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026), capaian kinerja adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 100%, hal tersebut dikarenakan dokumen RKPD Kota Cimahi Tahun 2025 serta Renja-PD Tahun 2025 masih dalam tahap rancangan awal. Capaian kinerja diperoleh berdasarkan penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024.

Capaian dihitung pada triwulan II dan III berdasarkan rata-rata persentase program pada RKPD yang tercantum dalam RPD dan persentase indikator program RKPD yang tercantum pada RPD.

- c. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (dalam hal ini berupa dokumen RPD Tahun 2023-2026 Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia), capaian kinerja adalah 0% dari target 100%.

Capaian kinerja 0% dikarenakan dokumen RKPD Kota Cimahi Tahun 2025 serta Renja-PD Tahun 2025 masih dalam tahap rancangan awal.

Capaian dihitung pada triwulan II dan III berdasarkan rata-rata Persentase Kesesuaian Renstra-PD dengan RPD, Persentase Kesesuaian Renja-PD dengan RKPD; Persentase Kesesuaian antara Renja-PD dengan Renstra-PD Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- d. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 100%.

Capaian kinerja 0% dikarenakan dokumen RKPD Kota Cimahi Tahun 2025 serta Renja-PD Tahun 2025 masih dalam tahap rancangan awal.

Capaian dihitung pada triwulan II dan III berdasarkan rata-rata Persentase Kesesuaian Renstra-PD dengan RPD, Persentase Kesesuaian Renja-PD dengan RKPD; Persentase Kesesuaian antara

Renja-PD dengan Renstra-PD Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

- e. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, capaian kinerja adalah 0 %, dari target 100%.

Capaian kinerja 0% dikarenakan dokumen RKPD Kota Cimahi Tahun 2025 serta Renja-PD Tahun 2025 masih dalam tahap rancangan awal.

Capaian dihitung pada triwulan II dan III berdasarkan rata-rata Persentase Kesesuaian Renstra-PD dengan RPD, Persentase Kesesuaian Renja-PD dengan RKPD; Persentase Kesesuaian antara Renja-PD dengan Renstra-PD Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.

- f. Persentase Capaian Indikator Program, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 85%.

Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan rata-rata dari persentase capaian realisasi per indikator program.

- g. Persentase Capaian Indikator Program Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, capaian kinerja adalah 0% dari target 85%. Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan rata-rata dari persentase capaian per indikator program Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- h. Persentase Capaian Indikator Program Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, capaian kinerja adalah 0% dari target 85%. Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan rata-rata dari persentase capaian per indikator program Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

- i. Persentase Capaian Indikator Program Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, capaian kinerja adalah 0% dari target 85%. Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan persentase capaian indikator program Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.

- j. Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Dihasilkan dan Didiseminasikan, capaian kinerja 0% dikarenakan masih dalam tahap pelaksanaan penelitian bersama Perguruan Tinggi. Target kinerja dapat diukur pada akhir tahun anggaran.

Capaian kinerja diperoleh berdasarkan perhitungan rata-rata dari jumlah penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dibagi jumlah penelitian dan pengembangan yang direncanakan dalam

satu tahun dikalikan 100; jumlah penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan dibagi dengan jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dikalikan 100%.

- k. Persentase Pengembangan Inovasi, capaian kinerja 0% dikarenakan masih dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan. Target kinerja diukur pada akhir tahun anggaran.

Capaian kinerja diperoleh berdasarkan jumlah inovasi yang dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja dibagi dengan jumlah inovasi yang dihasilkan.

- l. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja adalah A, yaitu tercapai 100% dari target A berdasarkan nilai evaluasi LKIP Bappelitbangda Kota Cimahi.

Capaian dihitung berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Kota Cimahi. Pelaksanaan program dan kegiatan akan meningkatkan capaian nilai LKIP tahun berikutnya. Selain itu pencapaian diperoleh dengan melengkapi kekurangan dokumen SAKIP serta menerapkan skema monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik terhadap rencana aksi yang telah disusun.

- m. Indeks Profesionalitas ASN, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 68,00.

Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan rata-rata nilai hasil input Indeks Profesionalitas (IP) ASN pada aplikasi MySAPK dan pengukuran yang dilakukan oleh BKPSDMD Kota Cimahi.

- n. Nilai IKM Perangkat Daerah, capaian kinerja 0% yaitu tercapai 0% dari target 81,50.

Capaian dihitung pada triwulan berdasarkan perhitungan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/perangkat daerah pengguna layanan.

- 3. Capaian kinerja kegiatan pada sejumlah program telah menunjukkan persentase sesuai dengan target, pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagian besar telah sesuai dengan target yakni rata-rata kinerjanya sebesar 34,91%, pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah saat ini rata-rata capaian kinerja kegiatannya sebesar 15,94%, dan pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah rata-rata kinerja kegiatannya sebesar 22,38%. Sedangkan pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan masih belum dapat diukur kinerjanya, dalam hal ini capaian kinerja 0%. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar kegiatannya

masih dalam tahap persiapan, sehingga kinerjanya baru dapat diukur pada triwulan IV atau akhir tahun anggaran.

Capaian kinerja program dan kegiatan umumnya diukur berdasarkan *output* dokumen yang dihasilkan pada akhir tahu anggaran tanpa melihat tahapan pelaksanaan, seperti pada Trwiulan I telah dilaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2025, Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2025, serta Monitoring dan Evaluasi Renja-PD Triwulan IV dan Renstra serta RPD periode Tahun 2023. Capaian kinerja berupa dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan dapat diperoleh pada akhir tahun anggaran.

Target kinerja belum seluruhnya tercapai sesuai target triwulan I juga dikarenakan oleh mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan, adanya kendala dalam pemilihan penyedia barang dan jasa melalui *e-purchasing*, serta terlambatnya penerimaan Uang Persediaan sehingga realisasi anggaran untuk fasilitasi makan dan minum rapat serta perjalanan dinas tidak sesuai anggaran kas yang direncanakan. Hal ini menjadi bahan pertimbangan pergeseran anggaran pada perubahan APBD Tahun 2024, mengingat seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan harus tetap dilaksanakan.

Alternatif solusi penyelesaian masalah selain evaluasi dan sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan serta pergeseran anggaran pada APBD Tahun 2024 untuk beberapa kegiatan yang masih kekurangan anggaran dalam pencapaian target kinerjanya, juga dapat dilakukan koordinasi secara intensif dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi untuk percepatan proses pemilihan penyedia barang dan jasa.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pada triwulan I, seluruh pejabat pengelola program, kegiatan, sub kegiatan serta keuangan akan segera melakukan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Selain itu, pengelola keuangan akan menyusun strategi yang lebih baik dalam percepatan proses penyerapan anggaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 5 April 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH, KOTA CIMAHI



ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19730413 199803 1 006

[illegible]

BERITA ACARA
HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAH
TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Juli Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Nomor 900/Kep.01/Bappelitbangda dan Nomor 900/Kep. 02- tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Bappelitbangda Kota Cimahi serta Penunjukan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi, dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- a. Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, capaian kinerja dihitung berdasarkan jumlah usulan prioritas Musrenbang tingkat kota yang dapat diakomodir dalam RKPD dibagi dengan jumlah usulan Musrenbang tingkat kota dikali 100. Capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100,00%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.

Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut, dijelaskan bahwa seluruh usulan telah terekam pada aplikasi SIPD.

- b. Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100% yaitu tercapai 100% dari target 100%. Capaian dihitung berdasarkan rata-rata persentase kesesuaian prioritas antara RKPD Tahun 2024 dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RKPD Provinsi Jawa Barat, Persentase kesesuaian program antara Renstra dengan RPD, Persentase kesesuaian program antara Renja dengan RKPD, Persentase kesesuaian program antara Renja dengan Renstra.

Capaian dihitung berdasarkan rata-rata kinerja kegiatan pada Triwulan II melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan pada bidang-bidang perencanaan, yaitu melalui Sub Kegiatan Penyusunan dan Perencanaan dan Pendanaan, Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan

Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam, dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Faktor yang mendorong tercapainya kinerja yaitu:

- 1) Indikator kinerja dari sasaran RPD untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik merupakan prioritas pada tahun anggaran 2024;
 - 2) Pelaksanaan tugas sesuai Proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur; dan
 - 3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan antara bidang perencanaan di internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah terlaksana dengan baik.
- c. Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0% yaitu tercapai 0% dari target 85%. Capaian dihitung pada Triwulan IV berdasarkan rata-rata capaian IKK, yaitu indikator kinerja Tujuan dan Sasaran strategis RKPD.

Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut, pelaksana program dan kegiatan akan tetap melaksanakan koordinasi, asistensi serta monev untuk memastikan ketercapaian target kinerja di akhir tahun

- d. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 85%. Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan Rata-rata dari:
- 1) Persentase Hasil kelitbangan tersosialisasi / terdiseminasi;
 - 2) Persentase Hasil pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan;
 - 3) Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen perencanaan dan atau perumusan kebijakan.

Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut, dijelaskan bahwa seluruh tahap kelitbangan masih dalam proses persiapan. Pelaksana program dan kegiatan akan tetap melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, koordinasi dan konsultasi dengan *stakeholders* untuk memastikan ketercapaian target kinerja di akhir tahun.

- e. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 79,32, yaitu tercapai 100% dari target 65. Capaian dihitung pada triwulan II berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Kota Cimahi dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

2. Capaian Kinerja Program sebagai berikut :

- a. Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota, dihitung berdasarkan Jumlah Unsur Masyarakat yang terlibat dalam musrenbang tingkat Kota dibagi Unsur Masyarakat di Kota Cimahi dikali 100.

Capaian kinerja 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.

- b. Presentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD (dalam hal ini berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026), capaian kinerja adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%, karena dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2025 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 telah memasuki tahap rancangan akhir.

Capaian dihitung berdasarkan rata-rata persentase program pada RKPD yang tercantum dalam RKPD dan persentase program pada RKPD yang tercantum pada RPD. Adapun faktor yang mendorong tercapainya kinerja yaitu:

- 1) Ketersediaan dana tepat waktu dalam mendukung rangkaian penyusunan rancangan dokumen perencanaan yaitu RKPD dan Renja-PD; dan
- 2) Koordinasi antar pihak terkait dalam menyelesaikan dokumen perencanaan sampai dengan rancangan akhir terlaksana dengan baik.

- c. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (dalam hal ini berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026) bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, capaian kinerja adalah 100%, dari target 100%.

Capaian kinerja telah memenuhi target 100%, faktor pendorongnya adalah indikator kinerja tersebut merupakan prioritas dalam penganggaran dan ketetapan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan rancangan akhir.

Capaian kinerja dihitung berdasarkan rata-rata dari Persentase Kesesuaian Renstra Perangkat Daerah dengan RPD; Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD; Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- d. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA (RPD Tahun 2023-2026 Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA) capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.

Capaian kinerja telah memenuhi target 100%, faktor pendorongnya adalah indikator kinerja tersebut merupakan prioritas dalam penganggaran serta ketepatan waktu penyelesaian sampai dengan rancangan akhir dalam menyusun dokumen perencanaan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA.

Capaian kinerja dihitung berdasarkan rata-rata dari Persentase Kesesuaian Renstra Perangkat Daerah dengan RPD; Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD; Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA.

- e. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, capaian kinerja adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.

Capaian kinerja telah memenuhi target 100%, hal yang mendorong tercapainya kinerja dikarenakan kinerja tersebut merupakan prioritas dalam penganggaran dan ketepatan waktu penyusunan rancangan akhir dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.

Capaian kinerja dihitung berdasarkan rata-rata dari Persentase Kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD; Persentase Kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD; dan Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

- f. Persentase capaian indikator program, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 85%.

Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan Rata-rata dari: persentase capaian realisasi per indikator program.

- g. Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, capaian kinerja adalah 0 %, dari target 85%.

Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan Rata-rata dari: Persentase capaian per indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- h. Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 85%.

Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan Rata-rata dari : Persentase capaian per indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA.

- i. Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 85%.

Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.

- j. Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan, capaian kinerja masih 0% karena masih dalam tahap pelaksanaan penelitian bersama perguruan tinggi. Target kinerja diukur pada akhir tahun anggaran.

Capaian kinerja dihitung berdasarkan Rata-rata dari : Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dibagi jumlah penelitian dan pengembangan yang direncanakan dalam satu tahun dikali 100; Jumlah penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan dibagi dengan jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dikali 100.

- k. Persentase pengembangan inovasi, capaian kinerja masih 0% karena masih dalam tahap persiapan. Target kinerja diukur pada akhir tahun anggaran.

Capaian kinerja dihitung berdasarkan Jumlah inovasi yang dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja dibagi dengan jumlah inovasi yang dihasilkan.

- l. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja adalah A, yaitu tercapai 100% dari target A nilai hasil evaluasi LKIP Bappelitbangda Kota Cimahi.

Capaian dihitung berdasarkan hasil Evaluasi Inspektorat Kota Cimahi.

Pelaksana program dan kegiatan akan meningkatkan capaian nilai LKIP tahun berikutnya dengan melengkapi kekurangan dokumen SAKIP serta menerapkan skema monev secara periodik terhadap rencana aksi yang telah disusun.

- m. Indeks Profesionalitas ASN, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 68,00.

Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan Rata-rata nilai yang bersumber dari hasil input Indeks Profesionalitas (IP) ASN pada aplikasi MySAPK dan pengukuran oleh BKPSDMD Kota Cimahi.

- n. Nilai IKM Perangkat Daerah, capaian kinerja adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 81,50.

Capaian dihitung pada triwulan III berdasarkan Perhitungan hasil survei kepuasan masyarakat/perangkat daerah pengguna layanan.

3. Capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagian besar telah sesuai dengan target kinerja dan waktu yang ditetapkan dengan capaian 59,02%. Masih terdapat sejumlah kinerja yang belum diukur, karena sejumlah kegiatan baru dapat dilakukan pengukuran kinerja pada Triwulan III dan IV. Sedangkan kinerja kegiatan pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi saat ini rata-rata kinerjanya telah mencapai 42,54%, hal ini dikarenakan sebagian kegiatan dan pekerjaan baru akan terlaksana pada Triwulan III dan IV. Kemudian terdapat beberapa pekerjaan yang direncanakan selesai di Triwulan II akan tetapi tidak terlaksana karena mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, capaian kinerja rata-rata kegiatan pada Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu sebesar 55%, sejauh ini capaian kinerja masih sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk capaian kinerja kegiatan pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan masih belum dapat diukur kinerjanya atau masih 0%.

Capaian kinerja program dan kegiatan umumnya diukur berdasarkan output dokumen yang dihasilkan pada akhir tahun anggaran tanpa melihat tahapan pelaksanaan, seperti pada Triwulan II telah dilaksanakan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun Anggaran 2025, Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045, koordinasi dan asistensi penyusunan rancangan akhir Renja Tahun 2025, serta Monev Hasil Renja Triwulan I-II Tahun 2024, Monev Hasil Renstra, serta Monev Hasil RPD Periode Tahun 2023. Capaian kinerja berupa dokumen perencanaan, monev dan pelaporan diperoleh pada akhir tahun.

Target kinerja yang belum tercapai juga disebabkan oleh mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan, kendala dalam pemilihan penyedia barang dan jasa melalui *e-purchasing*, serta terlambatnya diterimanya Ganti Uang sehingga realisasi anggaran untuk fasilitasi makan dan minum rapat serta perjalanan dinas tidak sesuai anggaran kas yang direncanakan. Hal ini menjadi bahan pertimbangan pengeseran

anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2024, mengingat seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan harus tetap dilaksanakan.

Alternatif solusi penyelesaian masalah, selain dilakukan evaluasi dan sinkronisasi terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan serta pergeseran anggaran pada APBD Tahun 2024, juga dilakukan koordinasi secara intensif dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi untuk percepatan proses pemilihan penyedia barang dan jasa.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pada Triwulan II, seluruh pejabat pengelola program, kegiatan, sub kegiatan serta keuangan akan segera melakukan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Selain itu, memperhatikan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan capaian kinerja di tahun 2023, maka pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama dengan para Kepala Bidang akan melaksanakan reviu target kinerja Tahun 2024 sebagai bahan untuk merumuskan rencana perubahan target yang menjadi *input* penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 3 Juli 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19730413 199803 1 006

MONITORING DAN EVALUASI PEMERIKSAAN KEMERDIAAN
TINJAUAN PAKAR KHUSUS 2024
HAKAR PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN, PENGALIHAN DAN PENGEMBANGAN KUALIFIKASI CPD

[illegible]

[illegible]

BERITA ACARA
HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAH
TRIWULAN III TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan bulan Oktober Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Nomor 900/Kep.01/Bappelitbangda dan Nomor 900/Kep. 02- tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Bappelitbangda Kota Cimahi serta Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi, dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- a. Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, capaian kinerja dihitung berdasarkan jumlah usulan prioritas Musrenbang tingkat kota yang dapat diakomodir dalam RKPD dibagi dengan jumlah usulan Musrenbang tingkat kota dikali 100. Capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100,00%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.

Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut, dijelaskan bahwa seluruh usulan telah terekam pada aplikasi SIPD.

- b. Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100% yaitu tercapai 100% dari target 100%. Capaian dihitung berdasarkan rata-rata persentase kesesuaian prioritas antara RKPD Tahun 2024 dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RKPD Provinsi Jawa Barat, Persentase kesesuaian program antara Renstra dengan RPD, Persentase kesesuaian program antara Renja dengan RKPD, Persentase kesesuaian program antara Renja dengan Renstra.

Capaian dihitung berdasarkan rata-rata kinerja kegiatan pada Triwulan III melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan pada bidang-bidang perencanaan, yaitu melalui Sub Kegiatan Penyusunan dan Perencanaan dan Pendanaan, Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Faktor yang mendorong tercapainya kinerja yaitu:

- 1) Indikator kinerja dari sasaran RPD untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik merupakan prioritas pada tahun anggaran 2024;
- 2) Pelaksanaan tugas sesuai Proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur; dan
- 3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan antara bidang perencanaan di internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah terlaksana dengan baik.

- c. Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0% yaitu tercapai 0% dari target 85%. Capaian dihitung pada Triwulan IV berdasarkan rata-rata capaian IKK, yaitu indikator kinerja Tujuan dan Sasaran strategis RKPD.

Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut, pelaksana program dan kegiatan akan tetap melaksanakan koordinasi, asistensi serta *monev* untuk memastikan ketercapaian target kinerja di akhir tahun

- d. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 85%. Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan Rata-rata dari:

- 1) Persentase Hasil kelitbangan tersosialisasi / terdiseminasi;
- 2) Persentase Hasil pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan;
- 3) Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen perencanaan dan atau perumusan kebijakan.

Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut, dijelaskan bahwa seluruh tahap kelitbangan masih dalam proses persiapan. Pelaksana program dan kegiatan akan tetap melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, koordinasi dan konsultasi dengan *stakeholders* untuk memastikan ketercapaian target kinerja di akhir tahun.

- e. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 79,32, yaitu tercapai 100% dari target 65. Capaian dihitung pada triwulan II berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Kota Cimahi dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

2. Capaian Kinerja Program sebagai berikut :

- a. Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota, dihitung berdasarkan Jumlah Unsur Masyarakat yang terlibat dalam musrenbang tingkat Kota dibagi Unsur Masyarakat di Kota Cimahi dikali 100.

Capaian kinerja 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.

- b. Presentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD (dalam hal ini berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026), capaian kinerja adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%, karena dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2025 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 telah memasuki tahap rancangan akhir.

Capaian dihitung berdasarkan rata-rata persentase program pada RKPD yang tercantum dalam RKPD dan persentase program pada RKPD yang tercantum pada RPD. Adapun faktor yang mendorong tercapainya kinerja yaitu:

- 1) Ketersediaan dana tepat waktu dalam mendukung rangkaian penyusunan rancangan dokumen perencanaan yaitu RKPD dan Renja-PD; dan
- 2) Koordinasi antar pihak terkait dalam menyelesaikan dokumen perencanaan sampai dengan rancangan akhir terlaksana dengan baik.

- c. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (dalam hal ini berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026) bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, capaian kinerja adalah 100%, dari target 100%.

Capaian kinerja telah memenuhi target 100%, faktor pendorongnya adalah indikator kinerja tersebut merupakan prioritas dalam penganggaran dan ketetapan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan rancangan akhir.

Capaian kinerja dihitung berdasarkan rata-rata dari Persentase Kesesuaian Renstra Perangkat Daerah dengan RPD; Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD; Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- d. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Bidang Perencanaan Ekonomi

dan SDA (RPD Tahun 2023-2026 Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA) capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.

Capaian kinerja telah memenuhi target 100%, faktor pendorongnya adalah indikator kinerja tersebut merupakan prioritas dalam penganggaran serta ketepatan waktu penyelesaian sampai dengan rancangan akhir dalam menyusun dokumen perencanaan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA.

Capaian kinerja dihitung berdasarkan rata-rata dari Persentase Kesesuaian Renstra Perangkat Daerah dengan RPD; Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD; Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA.

- e. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, capaian kinerja adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.

Capaian kinerja telah memenuhi target 100%, hal yang mendorong tercapainya kinerja dikarenakan kinerja tersebut merupakan prioritas dalam penganggaran dan ketepatan waktu penyusunan rancangan akhir dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.

Capaian kinerja dihitung berdasarkan rata-rata dari Persentase Kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD; Persentase Kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD; dan Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

- f. Persentase capaian indikator program, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 85%.

Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan Rata-rata dari: persentase capaian realisasi per indikator program.

- g. Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, capaian kinerja adalah 0 %, dari target 85%.

Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan Rata-rata dari: Persentase capaian per indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- h. Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 85%.

Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan Rata-rata dari : Persentase capaian per indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA.

- i. Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 0%, yaitu tercapai 0% dari target 85%.

Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.

- j. Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan, capaian kinerja masih 0% karena masih dalam tahap pelaksanaan penelitian bersama perguruan tinggi. Target kinerja diukur pada akhir tahun anggaran.

Capaian kinerja dihitung berdasarkan Rata-rata dari : Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dibagi jumlah penelitian dan pengembangan yang direncanakan dalam satu tahun dikali 100; Jumlah penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan dibagi dengan jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dikali 100.

- k. Persentase pengembangan inovasi, capaian kinerja masih 0% karena masih dalam tahap persiapan. Target kinerja diukur pada akhir tahun anggaran.

Capaian kinerja dihitung berdasarkan Jumlah inovasi yang dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja dibagi dengan jumlah inovasi yang dihasilkan.

- l. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja adalah A, yaitu tercapai 100% dari target A nilai hasil evaluasi LKIP Bappelitbangda Kota Cimahi.

Capaian dihitung berdasarkan hasil Evaluasi Inspektorat Kota Cimahi.

Pelaksana program dan kegiatan akan meningkatkan capaian nilai LKIP tahun berikutnya dengan melengkapi kekurangan dokumen SAKIP serta menerapkan skema monev secara periodik terhadap rencana aksi yang telah disusun.

- m. Indeks Profesionalitas ASN, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 135,44%, yaitu tercapai 92,10 dari target 68,00.

Capaian dihitung pada triwulan III berdasarkan Rata-rata nilai yang bersumber dari hasil input Indeks Profesionalitas (IP) ASN pada aplikasi MySAPK dan pengukuran oleh BKPSDMD Kota Cimahi.

- n. Nilai IKM Perangkat Daerah, capaian kinerja adalah 103,87% yaitu tercapai 84,66 dari target 81,50.

Capaian dihitung pada triwulan III berdasarkan Perhitungan hasil survei kepuasan masyarakat/perangkat daerah pengguna layanan.

- 3. Capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagian besar telah sesuai dengan target kinerja dan waktu yang ditetapkan dengan capaian 87,92%. Masih terdapat beberapa kegiatan yang akan diselesaikan di akhir Triwulan IV Tahun 2024. Sedangkan kinerja Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi saat ini rata-rata kinerjanya telah mencapai 55,36%, hal ini dikarenakan sebagian kegiatan dan pekerjaan baru akan terlaksana dan hasilnya baru dapat diukur pada Triwulan IV.

Selanjutnya, capaian kinerja rata-rata kegiatan pada Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu sebesar 78%, sejauh ini capaian kinerja masih sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk capaian kinerja kegiatan pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan masih belum dapat diukur kinerjanya atau masih 0%.

Capaian kinerja program dan kegiatan umumnya diukur berdasarkan output dokumen yang dihasilkan pada akhir tahun anggaran tanpa melihat tahapan pelaksanaan, seperti pada Triwulan III telah ditetapkannya dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024, koordinasi dan asistensi penyusunan rancangan perubahan Renja Tahun 2024, serta monitoring dan evaluasi hasil Renja Triwulan II. Capaian kinerja berupa dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan baru dapat dilakukan di akhir tahun.

Target kinerja yang belum tercapai juga disebabkan oleh mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan, kendala dalam pemilihan penyedia barang dan jasa melalui *e-purchasing*, serta terlambatnya diterimanya Ganti Uang sehingga realisasi anggaran untuk fasilitasi makan dan minum rapat serta perjalanan dinas tidak sesuai anggaran kas yang direncanakan. Hal ini menjadi bahan pertimbangan pergeseran anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2024, mengingat seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan harus tetap dilaksanakan.

Alternatif solusi penyelesaian masalah, selain dilakukan evaluasi dan sinkronisasi terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan serta pergeseran anggaran pada APBD Tahun 2024, juga dilakukan koordinasi secara intensif

dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi untuk percepatan proses pemilihan penyedia barang dan jasa.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pada triwulan III, seluruh pejabat pengelola program, kegiatan, sub kegiatan serta keuangan akan segera melakukan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Selain itu, pengelola keuangan akan menyusun strategi yang lebih baik dalam percepatan proses penyerapan anggaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 8 Oktober 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19730413 199803 1 006

KADAR FENOL DALAM PERILAKUAN PERILITAN DAN PENYEMIRANAN DAKAM KOTA CILIKI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Order: 2000-0000

DEPARTMENT OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C. 20315-5000



BERITA ACARA
HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAH
TRIWULAN IV TAHUN 2024

Pada hari ini Senin, tanggal Enam bulan Januari Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Nomor 900/Kep.01/Bappelitbangda dan Nomor 900/Kep. 02- tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Bappelitbangda Kota Cimahi serta Penunjukan Pejabat Pelaksanakan Teknis Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi, dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- a. Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, capaian kinerja dihitung berdasarkan jumlah usulan prioritas Musrenbang tingkat kota yang dapat diakomodir dalam RKPD dibagi dengan jumlah usulan Musrenbang tingkat kota dikali 100. Capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100,00%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.

Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut, dijelaskan bahwa seluruh usulan telah terekam pada aplikasi SIPD.

- b. Persentase Keselarasan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100% yaitu tercapai 100% dari target 100%. Capaian dihitung berdasarkan rata-rata persentase kesesuaian prioritas antara RKPD dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RKPD Provinsi Jawa Barat, Persentase kesesuaian program antara Renstra dengan RPJMD, Persentase kesesuaian program antara Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan RKPD, Persentase kesesuaian program antara Renja-PD dengan Renstra.

Capaian dihitung berdasarkan rata-rata kinerja kegiatan pada Triwulan II dan II melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan pada bidang-bidang perencanaan, yaitu melalui Sub Kegiatan Penyusunan dan Perencanaan dan Pendanaan, Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Faktor yang mendorong tercapainya kinerja yaitu:

- 1) Indikator kinerja dari sasaran RPD untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik merupakan prioritas pada tahun anggaran 2024;
 - 2) Pelaksanaan tugas sesuai Proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur; dan
 - 3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan antara bidang perencanaan di internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah terlaksana dengan baik.
- c. Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 98,68% yaitu tercapai 102,26% dari target 96,5%. Capaian dihitung pada Triwulan IV berdasarkan rata-rata capaian IKK, yaitu indikator kinerja Tujuan dan Sasaran strategis Perubahan RKPD dan Renja Tahun 2024. Capaian kinerja melampaui target karena masih terdapat perbedaan formulasi pengukuran indikator, sehingga memungkinkan terjadinya realisasi kinerja melebihi target, juga belum tepatnya penetapan target kinerja karena kurang atau tidak adanya *baseline* data.
- Menindaklanjuti capaian kinerja tersebut, pelaksana program dan kegiatan akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang kompeten mengenai formulasi pengukuran kinerja yang akan digunakan di tahun anggaran mendatang melalui mekanisme *reviu* indikator dan target kinerja.
- d. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 86,11%, yaitu tercapai 101,31% dari target 85%. Capaian dihitung pada triwulan IV berdasarkan Rata-rata dari:
- 1) Persentase Hasil kelitbangan tersosialisasi / terdiseminasi;
 - 2) Persentase Hasil pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan;
 - 3) Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen perencanaan dan atau perumusan kebijakan.

Tercapai dan terlampauinya target kinerja tersebut dikarenakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersedia tepat waktu sehingga koordinasi dan konsultasi antara

pelaksana program dan kegiatan, perguruan tinggi dan *stakeholders* terkait terlaksana dengan baik.

- e. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 79,32 yaitu tercapai 100% dari target 79,32 setelah dilakukan penyesuaian target kinerja pada perubahan Renja Tahun 2024 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Inspektorat. Capaian dihitung berdasarkan hasil *self assesment* terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi.

Tercapainya dan terlampauinya target kinerja tersebut dikarenakan terpenuhinya sejumlah komponen penilaian baru yang terdapat pada perubahan lembar kerja evaluasi dari Kementerian PAN-RB, walaupun beberapa komponen penilaian belum ditetapkan kriteria dan hasilnya.

2. Capaian Kinerja Program sebagai berikut :

- a. Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota, dihitung berdasarkan Jumlah Unsur Masyarakat yang terlibat dalam musrenbang tingkat Kota dibagi Unsur Masyarakat di Kota Cimahi dikali 100.

Capaian kinerja 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.

- b. Persentase Kesesuaian Program RKPD dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, capaian kinerja adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%, karena dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2023, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 serta Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan.

Capaian dihitung berdasarkan rata-rata persentase program pada RKPD yang tercantum dalam RPD dan persentase program pada RKPD yang tercantum pada RPD. Adapun faktor yang mendorong tercapainya kinerja yaitu:

- 1) Ketersediaan dana tepat waktu dalam mendukung penyusunan sampai dengan penetapan dokumen perencanaan yaitu RKPD dan Renja-PD; dan
 - 2) Koordinasi antar pihak terkait dalam menyelesaikan dokumen perencanaan sampai dengan penetapan dokumen RKPD dan Renja-PD terlaksana dengan baik.
- c. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (dalam hal ini berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026) bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, capaian kinerja adalah 100%, dari target 100%.

Capaian kinerja telah memenuhi target 100%, faktor pendorongnya adalah indikator kinerja tersebut merupakan prioritas dalam penganggaran dan ketetapan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan rancangan akhir.

Capaian kinerja dihitung berdasarkan rata-rata dari Persentase Kesesuaian Renstra Perangkat Daerah dengan RPD; Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD; Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- d. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA (RPD Tahun 2023-2026 Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA) capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.

Capaian kinerja telah memenuhi target 100%, faktor pendorongnya adalah indikator kinerja tersebut merupakan prioritas dalam penganggaran serta ketepatan waktu penyelesaian sampai dengan rancangan akhir dalam menyusun dokumen perencanaan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA.

Capaian kinerja dihitung berdasarkan rata-rata dari Persentase Kesesuaian Renstra Perangkat Daerah dengan RPD; Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD; Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA.

- e. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, capaian kinerja adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100%.

Capaian kinerja telah memenuhi target 100%, hal yang mendorong tercapainya kinerja dikarenakan kinerja tersebut merupakan prioritas dalam penganggaran dan ketepatan waktu penyusunan rancangan akhir dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.

Capaian kinerja dihitung berdasarkan rata-rata dari Persentase Kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD; Persentase Kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD; dan Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

- f. Persentase Capaian Indikator Program, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 98,68% yaitu tercapai 102,26% dari target 96,5%.

Capaian dihitung pada Triwulan IV berdasarkan rata-rata dari persentase capaian realisasi per indikator program. Terlampauinya target kinerja tersebut dikarenakan dukungan ketersediaan anggaran yang tepat waktu dan koordinasi yang terlaksana dengan baik antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

- g. Persentase Capaian Indikator Program Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, capaian kinerja adalah 97,8% yaitu tercapai 101,35% dari target 96,5%.

Capaian dihitung pada Triwulan IV berdasarkan rata-rata dari persentase capaian per indikator Program Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Terlampauinya target kinerja tersebut dikarenakan dukungan ketersediaan anggaran yang tepat waktu dan koordinasi yang terlaksana dengan baik antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Namun terlampauinya target kinerja juga disebabkan oleh kendala perbedaan formulasi yang digunakan dalam pengukuran indikator sehingga memungkinkan realisasi jauh melebihi target. Selain itu, juga disebabkan belum tepatnya penetapan target kinerja karena kurang atau tidak adanya *baseline data*.

- h. Persentase Capaian Indikator Program Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 99,11% yaitu tercapai 102,70% dari target 96,5%. Terlampauinya target kinerja tersebut dikarenakan dukungan ketersediaan anggaran yang tepat waktu dan koordinasi yang terlaksana dengan baik antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah di Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA.

Namun terlampauinya target kinerja juga disebabkan oleh kendala perbedaan formulasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja

indikator sehingga memungkinkan realisasi jauh melebihi target. Selain itu, juga disebabkan belum tepatnya penetapan target kinerja karena kurang atau tidak adanya *baseline* data.

- i. Persentase Capaian Indikator Program Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 99,14% yaitu tercapai 102,74% dari target 96,5%.

Capaian dihitung pada Triwulan IV berdasarkan rata-rata dari persentase capaian indikator Program Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan. Terlampauinya target kinerja tersebut dikarenakan dukungan ketersediaan anggaran yang tepat waktu dan koordinasi yang terlaksana dengan baik antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.

Namun terlampauinya target kinerja juga disebabkan oleh kendala perbedaan formulasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja indikator sehingga memungkinkan realisasi jauh melebihi target. Selain itu, juga disebabkan belum tepatnya penetapan target kinerja karena kurang atau tidak adanya *baseline* data.

- j. Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan dan Didiseminasikan, capaian kinerja 100% yaitu tercapai 100% dari target 100%. Capaian kinerja dihitung berdasarkan Rata-rata dari : jumlah penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dibagi jumlah penelitian dan pengembangan yang direncanakan dalam satu tahun dikali 100; jumlah penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan dibagi dengan jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dikali 100.

Pelaksanaan penyusunan sejumlah kajian tematik telah selesai dilaksanakan melalui kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Hasil kajian tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah, salah satunya Kajian Produk Unggulan Daerah yang akan menjadi peta jalan inovasi serta penelitian dan pengembangan Kota Cimahi Tahun 2025-2029.

Faktor pendorong terpenuhinya target dikarenakan ketersediaan anggaran tepat waktu dalam mendukung koordinasi dan konsultasi antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Perguruan Tinggi serta stakeholders terkait.

k. Persentase Pengembangan Inovasi, capaian kinerja 85%, yaitu tercapai 100% dari target 117,65%. Capaian kinerja dihitung berdasarkan Jumlah Inovasi yang dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja dibagi dengan jumlah inovasi yang dihasilkan. Faktor pendorong terpenuhinya target dikarenakan ketersediaan anggaran tepat waktu dalam mendukung koordinasi dan konsultasi pengembangan inovasi antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Perguruan Tinggi serta stakeholders terkait.

l. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja adalah A, yaitu tercapai 100% dari target A nilai hasil evaluasi LKIP Bappelitbangda Kota Cimahi.

Capaian dihitung berdasarkan hasil Evaluasi Inspektorat Kota Cimahi. Pelaksana program dan kegiatan akan meningkatkan capaian nilai LKIP tahun berikutnya dengan melengkapi kekurangan dokumen SAKIP serta menerapkan skema *money* secara periodik terhadap rencana aksi yang telah disusun.

m. Indeks Profesionalitas ASN, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 90,67%, yaitu tercapai 115,72% dari target 78,35.

Capaian dihitung berdasarkan Rata-rata nilai berdasarkan hasil input Indeks Profesionalisme (IP) ASN pada aplikasi MySAPK dan pengukuran oleh BKPSDMD Kota Cimahi pada tahun 2023. Sedangkan IP ASN Tahun 2024 baru akan dirilis pada Bulan April 2025.

Faktor pendorong tercapainya kinerja adalah ketepatan waktu dalam input hasil kinerja, meningkatnya kompetensi ASN di Bappelitbangda dengan terselenggaranya *In House Training* (IHT) sebanyak 2 (dua) kali dan pengiriman peserta pelatihan dan pendidikan serta meningkatnya disiplin pegawai (tidak terdapat kasus pelanggaran disiplin selama tahun 2023-2024).

n. Nilai IKM Perangkat Daerah, capaian kinerja adalah 84,66% yaitu tercapai 100,19% dari target 84,50.

Capaian dihitung berdasarkan hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat dan/atau perangkat daerah pengguna layanan melalui pengisian kuesioner. Hal yang mendorong tercapainya kinerja melampaui target adalah peningkatan jumlah responden yang mengisi kuesioner, terutama pada peserta Musrenbang dan Kompetisi *ChiMA*, pemohon yang melaksanakan kerja praktik serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan

yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

3. Capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagian besar telah sesuai target dengan rata-rata capaian mencapai lebih dari 100% terhadap target. Faktor pendorong tercapainya kinerja adalah ketepatan waktu dalam penganggaran dan pemilihan penyedia barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Selain itu, formulasi yang digunakan untuk mengukur kinerja telah sesuai dengan ketentuan penilaian. Sedangkan rata-rata kinerja kegiatan pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan IV menunjukkan ketercapaian sebesar lebih dari 100%. Masih terdapat perbedaan formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja program, mengakibatkan realisasi melampaui target kinerja. Capaian kinerja kegiatan pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100% dari target kinerja sebesar 100%.

Terdapat salah satu aktivitas dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang tidak terlaksana. Sub kegiatan tersebut tidak memenuhi target dikarenakan adanya penyesuaian alokasi anggaran yang difokuskan untuk menunjang kinerja organisasi secara menyeluruh, sehingga pemeliharaan gedung kantor akan direncanakan dan dilaksanakan di tahun 2025.

4. Berdasarkan hasil capaian kinerja program dan kegiatan, diperoleh persentase capaian pada sejumlah program dan kegiatan yang melebihi target karena *baseline* data dalam penetapan target kinerja belum memenuhi kaidah. Alternatif dan solusi penyelesaian masalah adalah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak yang memiliki kompetensi melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terkait pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan serta melaksanakan *reviu* indikator dan target kinerja secara berkala, termasuk merekomendasikan pelaksanaan *reviu* kepada seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Cimahi.

Alternatif solusi penyelesaian masalah, selain dilakukan evaluasi dan sinkronisasi terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan serta pergeseran

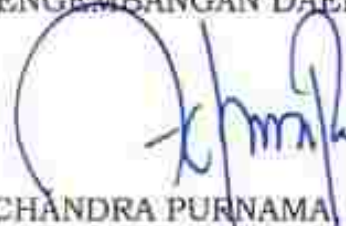
anggaran pada APBD Tahun 2024, juga dilakukan koordinasi secara intensif dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cimahi untuk percepatan proses pemilihan penyedia barang dan jasa.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pada Triwulan IV, seluruh pejabat pengelola program, kegiatan, sub kegiatan serta keuangan akan segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak yang berkompeten terkait reviu indikator dan target kinerja untuk meningkatkan kualitas kinerja sehingga hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Bappelitbangda untuk tahun-tahun berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 6 Januari 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19730413 199803 1 006

MONITORING DAN EVALUASI KEMERDEKAAN KIRKITA PERANGKAT DAERAH
TRIMULAH IV TAHUN 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

